

Dr.Jamridafrizal, S.Ag., S.S., M.Hum

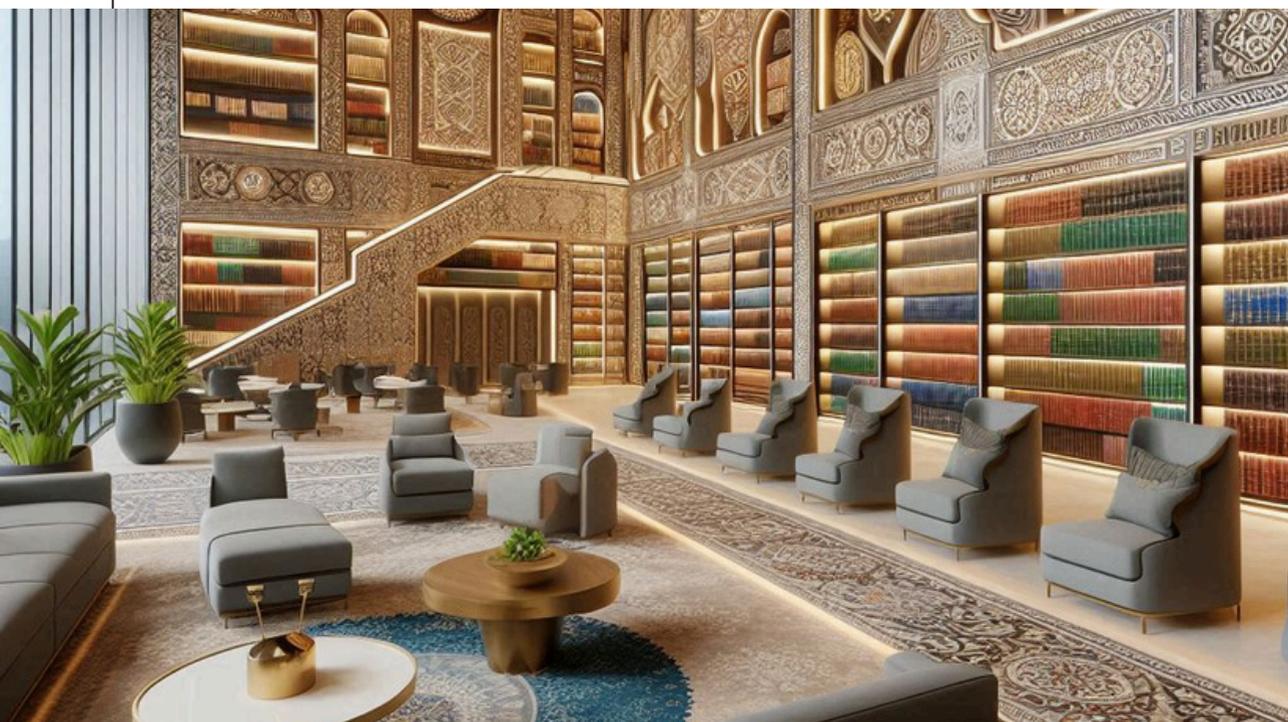
Zulfitri, S.Ag., M.A.

M. Farid Wajdi, S.Si., S.IPL., M.Hum

Editor : Andi Saputra, S.Kom., M.Kom.

# PERPUSTAKAAN SEBAGAI INSTITUSI

## Perspektif Organisasi dan Regulasi



# **PERPUSTAKAAN SEBAGAI INSTITUSI**

Perspektif Organisasi dan Regulasi

Penulis :

Dr. Jamridafrizal, S.Ag., S.S., M.Hum

Zulfitri, S.Ag., M.A.

Muhammad Farid Wajdi, S.Si., S.IPI., M.Hum

Editor : Andi Saputra, S.Kom., M.Kom.



# **PERPUSTAKAAN SEBAGAI INSTITUSI**

Perspektif Organisasi dan Regulasi

Penulis :

Dr. Jamridafrizal, S.Ag., S.S., M.Hum  
Zulfitri, S.Ag., M.A.  
Muhammad Farid Wajdi, S.Si., S.IPI., M.Hum

Editor : Andi Saputra, S.Kom., M.Kom.

Desain  
Arielaksita

Cetakan I Juni 2024

Diterbitkan oleh  
Yayasan Laksita Indonesia  
Anggota IKAPI  
KSB Kelapa Gading Blok AJ 23-24 Kota Serang Banten 42122  
Ph : 081292652034/081284504441  
<https://laksitaindonesia.site>  
Email : [laksitaindonesia@gmail.com](mailto:laksitaindonesia@gmail.com)

Jamridafrizal, Zulfitri, Muhammad Farid Wajdi  
Perpustakaan Sebagai Institusi :  
Perspektif Organisasi Dan Regulasi  
Cet. 1 – Laksita Indonesia, 2024 212 hlm, 17 x 25 cm  
ISBN 978-602-5749-26-1

Dilarang keras memproduksi sebagian atau seluruh isi buku ini, dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, serta menjualbelikannya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

**@HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG**



## PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

Setelah membahas perpustakaan sekolah/madrasah dengan segala aspek yang terkait, kini kita beralih ke jenis perpustakaan lain yang tak kalah penting dalam sistem pendidikan nasional, yaitu Perpustakaan Perguruan Tinggi. Perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki peran krusial dalam mendukung kegiatan akademik dan penelitian di lingkungan

kampus

### 7. 1 Pengertian Dan Dasar Hukum

Perpustakaan Perguruan Tinggi (sering disebut juga perpustakaan akademik) memiliki peran penting dalam dunia pendidikan tinggi. Sebagai bagian integral dari perguruan tinggi, perpustakaan ini mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan dan pengelolaannya dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi.

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menjadi landasan hukum utama. Pasal 45 ayat (1) UU Sisdiknas mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal, termasuk perguruan tinggi, wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan, termasuk perpustakaan. Lebih lanjut, Pasal 85 huruf a UU Sisdiknas juga mewajibkan perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.

UU No 43 tahun 2007 memberikan definisi yang lebih spesifik mengenai Perpustakaan Perguruan Tinggi. Pasal 1 ayat (10) UU No 43 Tahun 2007 menyatakan bahwa Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Definisi ini dipertegas kembali dalam PP No. 24 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (10), yang menambahkan bahwa Perpustakaan Perguruan Tinggi juga berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan.

Selain itu, UU No 43 Tahun 2007 juga mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk menyelenggarakan perpustakaan yang tidak hanya memenuhi standar nasional perpustakaan, tetapi juga memiliki koleksi yang mencukupi (Pasal 24). PP Perpustakaan kemudian memberikan ketentuan yang lebih rinci terkait koleksi (Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (3), kepemimpinan (Pasal 39 ayat (1), serta kriteria dan kompetensi kepala Perpustakaan Perguruan Tinggi (Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 39).

Menurut Curzon dan Quiñónez-Skinner (2009), Perpustakaan Perguruan Tinggi, yang juga disebut perpustakaan akademik, adalah perpustakaan yang

dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Lembaga-lembaga ini memberikan berbagai tingkat gelar mulai dari gelar Associate of Arts hingga gelar Baccalaureate, dan dari gelar Magister hingga gelar Doktor.<sup>351</sup>

## 7. 2 Perkembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia

Perkembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia sejalan dengan pertumbuhan pendidikan tinggi di negara ini. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 43 Tahun 2007 yang mewajibkan setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.

Renstra Perpusnas 2020-2024 memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia. Pada tahun 2018, tercatat 2. 057 Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia. Namun, rasio ketersediaan Perpustakaan Perguruan Tinggi masih rendah, yaitu 0,00010, mengindikasikan bahwa akses terhadap Perpustakaan Perguruan Tinggi masih terbatas dan perlu ditingkatkan<sup>352</sup>.

Renstra Perpustakaan Nasional menargetkan peningkatan persentase Perpustakaan Perguruan Tinggi yang dibina dan dikembangkan dari 5,88% pada tahun 2020 menjadi 7,83% pada tahun 2024. Fokus utamanya adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam layanan perpustakaan, dengan harapan Perpustakaan Perguruan Tinggi dapat menyediakan akses ke koleksi digital, e-journal, dan e-book untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan.

Meskipun terdapat upaya peningkatan, Renstra Perpustakaan Nasional juga mengidentifikasi tantangan utama dalam pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi, yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perpustakaan. Kualitas layanan perpustakaan sangat bergantung pada kompetensi pustakawan dan tenaga perpustakaan, sehingga tantangan ini perlu diatasi secara serius. Secara keseluruhan, Renstra Perpusnas 2020-2024 menggambarkan perkembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia yang positif namun masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Peningkatan aksesibilitas, kualitas layanan, dan pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mewujudkan Perpustakaan Perguruan Tinggi yang mampu mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal.

Di Indonesia, sebagian besar Perpustakaan Perguruan Tinggi dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag). Jumlah perpustakaan akademik di bawah Kemendikbudristek secara langsung terkait dengan jumlah perguruan tinggi. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

---

<sup>351</sup> Curzon, S. C., & Quiñónez-Skinner, J. (2009). Academic libraries. In *Encyclopedia of library and information sciences* (hlm.11-22). CRC press.

<sup>352</sup> Indonesia, P. N. R. (2020). Peraturan perpustakaan nasional republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang rencana strategis perpustakaan nasional tahun 2020-2024. *Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*.

Tabel 4. Jumlah Perpustakaan Akademik di Bawah Kemendikbudristek

Tahun	PTN	PTS	Total
2019	122	3129	3251
2020	122	3044	3166
2021	125	2982	3107

(<https://pddikti.kemdikbud.go.id>, diakses 15 mei 2023)

Pada tahun 2021, terdapat sekitar 3.107 perpustakaan akademik di Indonesia yang berada di bawah wewenang Kemendikbudristek. Adapun perpustakaan di bawah Kemenag RI ada pada setiap perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dengan perkiraan sekitar 847 perpustakaan. sebagaimana dapat dilihat pada tabel. 5

Table 5 Jumlah Perguruan Tinggi Di Bawah Kemenag Ri

Kategori Perguruan Tinggi					
UIN	IAIN	STAIN	FAI (SWSTA)	IAI (SWASTA)	STAIS
29	24	5	116	98	575

(sumber: emispendis.kemenag.go.id,2022)

Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak kemajuan pendidikan dan penelitian di negara ini. Dengan terus mengembangkan diri dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, Perpustakaan Perguruan Tinggi dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas, kritis, dan inovatif.

### 7.3 Prinsip-Prinsip Perpustakaan Perguruan Tinggi

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia telah didefinisikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang relevan. UU No 43 Tahun 2007, sebagai payung hukum utama, menggarisbawahi prinsip-prinsip kunci seperti pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, profesionalisme, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan (Pasal 2).

Prinsip-prinsip ini kemudian diperkuat dan dirinci lebih lanjut dalam peraturan turunannya. PP No 24 Tahun 2014 misalnya, menekankan pentingnya standar perpustakaan yang mengakomodasi kebutuhan pemustaka dengan disabilitas (Pasal 10) dan kualifikasi profesional pustakawan (Pasal 39).

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 juga turut menegaskan peran penting perpustakaan dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 24).

"Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi" yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2015,

memberikan panduan praktis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut. Pedoman ini menekankan peran perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan riset, pentingnya koleksi yang relevan dan terkini, serta profesionalisme pustakawan dalam memberikan layanan berkualitas.

Selain itu, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi ("SNP Perpustakaan PT") juga berperan penting dalam menjabarkan prinsip-prinsip tersebut menjadi standar-standar yang terukur dan dapat dievaluasi. SNP Perpustakaan PT mencakup berbagai aspek, mulai dari koleksi, sarana dan prasarana, layanan, tenaga perpustakaan, hingga manajemen dan penyelenggaraan perpustakaan.

Standar-standar dalam SNP Perpustakaan PT mencerminkan prinsip-prinsip seperti pembelajaran sepanjang hayat (melalui penyediaan koleksi yang relevan dan beragam), demokrasi, keadilan, dan inklusivitas (melalui layanan yang dapat diakses oleh semua anggota sivitas akademika), profesionalisme (melalui standar kualifikasi pustakawan), keterbukaan (melalui kewajiban pelaporan kinerja), keterukuran (melalui standar-standar kuantitatif), kemitraan (melalui dorongan untuk menjalin kerja sama), pelayanan prima (melalui standar layanan), dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (melalui kewajiban penggunaan TIK dalam pengelolaan dan pelayanan).

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Association of College and Research Libraries (ACRL) di Amerika Serikat juga telah merumuskan sembilan prinsip dasar Perpustakaan Perguruan Tinggi. Prinsip-prinsip ini mencakup efektivitas kelembagaan, nilai profesional, peran pendidikan, penemuan, koleksi, ruang, manajemen/administrasi/kepemimpinan, personil, dan hubungan eksternal. (ACRL, 2018).<sup>353</sup> Prinsip-prinsip ACRL ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami peran dan fungsi Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam mendukung misi dan tujuan institusi pendidikan tinggi.

Prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh ACRL ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, prinsip efektivitas kelembagaan ACRL sejalan dengan prinsip keterukuran dalam peraturan Indonesia, yang menekankan pentingnya pengukuran dan evaluasi kinerja perpustakaan. Prinsip nilai profesional ACRL juga sejalan dengan prinsip profesionalisme dalam peraturan Indonesia, yang menekankan pentingnya kualifikasi dan kompetensi pustakawan.

Dengan demikian, prinsip-prinsip Perpustakaan Perguruan Tinggi, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun yang dirumuskan oleh ACRL, memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan bahwa Perpustakaan Perguruan Tinggi dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan

---

<sup>353</sup> ACRL [Association of College and Research Libraries]. (2018). Standards for libraries in higher education. Chicago: Association of College & Research Libraries. Retrieved December 19, 2019.

efisien dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berkontribusi pada pengembangan pendidikan tinggi

## 7. 4 Fungsi Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki fungsi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 43 tahun 2007.

Kemudian, fungsi-fungsi tersebut dikembangkan lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi (2015) menjadi tujuh fungsi utama, yaitu: pendidikan, informasi, penelitian, rekreasi, publikasi, deposit, dan interpretasi.

1. Fungsi pendidikan: Perpustakaan menyediakan koleksi yang mendukung tujuan pembelajaran, mengorganisasi bahan pembelajaran sesuai program studi, dan mendukung evaluasi pembelajaran.
2. Fungsi informasi: Perpustakaan menyediakan akses mudah ke berbagai jenis informasi, termasuk buku, jurnal, artikel, dan sumber informasi elektronik lainnya, untuk mendukung kegiatan akademik dan penelitian.
3. Fungsi penelitian: Perpustakaan menyediakan bahan primer dan sekunder terkini untuk penelitian dan pengkajian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Fungsi rekreasi: Perpustakaan menyediakan koleksi rekreasi yang bermakna untuk membangun dan mengembangkan kreativitas, minat, dan inovasi pemustaka.
5. Fungsi publikasi: Perpustakaan membantu publikasi karya yang dihasilkan oleh civitas akademika, termasuk staf non-akademik.
6. Fungsi deposit: Perpustakaan berperan sebagai pusat deposit untuk semua karya dan pengetahuan yang dihasilkan oleh civitas akademika.
7. Fungsi interpretasi: Perpustakaan melakukan kajian dan memberikan nilai tambah terhadap sumber informasi yang dimilikinya untuk membantu pengguna dalam memahami dan menginterpretasikan informasi secara lebih mendalam. (hal. 6)

## 7. 5 Peran Perpustakaan Akademik Bagi Fakultas

Terlepas dari institusinya, perpustakaan akademik memainkan peran sentral bagi fakultas. Fakultas menempatkan nilai yang sangat tinggi pada koleksi perpustakaan akademik, langganan untuk penelitian dan pengajaran, versi monografi dan artikel online gratis, dan pinjaman antar perpustakaan atau layanan pengiriman dokumen (Blankstein & Wolff-Eisenberg, 2019)<sup>354</sup>. Namun, menariknya, meskipun direktur perpustakaan percaya ini adalah aspek penting dari layanan perpustakaan, mereka juga cenderung menempatkan nilai yang lebih besar pada pengembangan

---

<sup>354</sup> Blankstein, M., & Wolff-Eisenberg, C. (2019). Ithaca S+ R US Faculty Survey 2018. Ithaca S+ R. *New York: Ithaca*.

penelitian dan keterampilan literasi informasi oleh pustakawan serta penyediaan kegiatan instruksional untuk mahasiswa (Frederick & Wolff-Eisenberg, 2020).<sup>355</sup>

Hampir semua lembaga pemberi gelar swasta dan negeri di Indonesia memiliki perpustakaan, karena keberadaannya diwajibkan oleh UU No. 43 Tahun 2007. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan akses informasi dan sumber belajar bagi seluruh masyarakat akademik di Indonesia. Perpustakaan Perguruan Tinggi tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku dan jurnal, tetapi juga menjadi pusat kegiatan akademik yang dinamis, tempat mahasiswa, dosen, dan peneliti berinteraksi dengan pengetahuan dan mengembangkan ide-ide baru.

Kehadiran Perpustakaan Perguruan Tinggi yang lengkap dan terkelola dengan baik menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kualitas suatu perguruan tinggi. Oleh karena itu, perguruan tinggi di Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas perpustakaan mereka, baik dari segi koleksi, layanan, maupun infrastruktur. Beberapa Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia bahkan telah menjadi perpustakaan digital yang canggih, menyediakan akses ke berbagai sumber informasi elektronik dari seluruh dunia.

## 7.6 Pustakawan Perguruan Tinggi dan Isu-Isu Terkini

Pustakawan perguruan tinggi menghadapi berbagai tantangan dan peluang di era digital saat ini. Tantangan-tantangan ini menuntut pustakawan untuk terus beradaptasi dan mengembangkan kompetensi mereka agar tetap relevan dan mampu memberikan layanan terbaik bagi sivitas akademika. Beberapa isu terkini yang dihadapi oleh pustakawan perguruan tinggi antara lain:

### 7.6.1 Perpustakaan Sebagai Ruang Belajar

Secara historis, perpustakaan akademik berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku dan jurnal, menyediakan alat bantu pencarian seperti katalog, memfasilitasi sirkulasi koleksi, dan menjadi tempat menjawab pertanyaan referensi dari mahasiswa dan fakultas. Ruang-ruang kecil dengan meja dirancang untuk mendukung pembelajaran individu dan kelompok dalam suasana yang tenang. Fungsi utama perpustakaan adalah sebagai tempat untuk melestarikan, mengatur materi fisik, dan menyediakan akses untuk keperluan kelas dan penelitian (Fallin 2019)<sup>356</sup>.

Perpustakaan akademik abad ke-21 telah mengalami pergeseran konsep yang signifikan. Hal ini didorong oleh perubahan teknologi yang memperluas jangkauan perpustakaan melampaui batasan fisiknya, peningkatan layanan dukungan mahasiswa, dan desain arsitektur baru yang lebih terbuka. Perubahan ini

---

<sup>355</sup> Frederick, J., & Wolff-Eisenberg, C. (2020). Ithaca S+ R US library survey 2019.

<sup>356</sup> Fallin, L. (2016). Beyond books: The concept of the academic library as learning space. *New library world*, 117(5/6), 308-320.

juga mencerminkan perubahan dalam pedagogi kelas, dengan penekanan yang lebih besar pada pembelajaran aktif dan kolaboratif, terutama karena meningkatnya ketergantungan pada sumber daya digital. Akibatnya, perpustakaan akademik saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai gudang informasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang belajar yang dinamis yang mendorong kolaborasi, kerja kelompok, dan menyediakan berbagai layanan untuk meningkatkan pembelajaran dan kesuksesan mahasiswa (Fallin 2019; Spencer dan Watstein 2017).<sup>357</sup> Lebih dari 60% perpustakaan akademik telah melaporkan “penggunaan kembali ruang untuk belajar kelompok, area keberhasilan mahasiswa (pusat menulis/bimbingan belajar), ruang belajar yang tenang, ruang belajar teknologi, dan tempat duduk tambahan” (ALA 2015b, 7).<sup>358</sup>

Information Commons (IC), atau dengan istilah lain seperti "pusat informasi," "belajar bersama," atau "kesamaan instruksional," adalah konsep baru perpustakaan yang berfokus pada peserta didik, bukan lagi sekadar koleksi. IC menyediakan berbagai layanan perpustakaan yang beragam, terutama yang berbasis sumber daya digital. Fasilitasnya meliputi akses internet, database lokal, sistem temu kembali perpustakaan, katalog online, dan perangkat lunak khusus. Selain itu, IC juga menyediakan ruang konsultasi dengan staf referensi, layanan penulisan atau bimbingan belajar, serta area serbaguna untuk kelas atau lokakarya. Ruang-ruang ini dirancang secara fleksibel dan dilengkapi dengan teknologi modern untuk mendukung pembelajaran kolaboratif, seperti monitor layar besar, papan tulis, dan meja kerja. Beberapa ruang bahkan dapat diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu. (Asher 2017)<sup>359</sup>.

Perkembangan perpustakaan menjadi ruang belajar memiliki manfaat politik dan pedagogis yang signifikan. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa perpustakaan berkontribusi terhadap keberhasilan dan retensi mahasiswa, sehingga memperkuat posisi perpustakaan dalam mendapatkan dukungan anggaran dari institusi. Namun, perubahan ini juga dapat menimbulkan resistensi dari fakultas dan mahasiswa yang lebih menyukai pendekatan penelitian tradisional. (Allison et al. 2019). Meskipun demikian, IC sekarang merupakan bagian integral dari perpustakaan akademik, dan menyeimbangkan pendekatan pembelajaran baru dengan pendekatan tradisional akan menjadi proses yang berkelanjutan.

---

## 7. 6. 2 Menunjukkan Nilai dengan Retensi dan Keberhasilan Mahasiswa

---

<sup>357</sup> Spencer, M. E., & Watstein, S. B. (2017). Academic library spaces: Advancing student success and helping students thrive. *portal: Libraries and the Academy*, 17(2), 389-402.

<sup>358</sup> ALA (American Library Association). (2015b). The State of America's Libraries: 2015. Digital Supplement. *American Libraries* (April), 1-28.

<sup>359</sup> Asher, A. D. (2017). Space Use in the Commons: Evaluating a Flexible Learning Environment. *Evidence Based Library and Information Practice*, 12, 68-89.

Perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri (PTN) maupun swasta (PTS), menghadapi tantangan dalam membuktikan nilai dan relevansi mereka kepada masyarakat, terutama terkait biaya pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud 25/2020). PTN, meski sebagian besar didanai pemerintah, harus menunjukkan kualitas pendidikan dan kesiapan kerja lulusannya. Penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga bertujuan memastikan aksesibilitas pendidikan tinggi, namun penetapan UKT yang tinggi di beberapa PTN menuai protes karena dianggap kurang transparan dan adil. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti 39/2016).

PTS, yang bergantung pada biaya kuliah dari orang tua mahasiswa, harus bersaing ketat dengan menawarkan program studi relevan dan berkualitas dengan biaya terjangkau. Mereka juga perlu menunjukkan nilai tambah, seperti fasilitas modern, program magang, atau kerjasama dengan industri. Kemendikbud telah mengeluarkan regulasi keringanan uang kuliah, namun implementasinya masih menjadi tantangan, terutama bagi perguruan tinggi yang mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi. Secara keseluruhan, perguruan tinggi di Indonesia perlu terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan untuk mendapatkan kepercayaan publik.

Tantangan serupa juga dihadapi unit-unit non-pendapatan di dalam perguruan tinggi, termasuk perpustakaan. Frederick dan Wolff-Eisenberg (2020) mengungkapkan kekhawatiran banyak direktur perpustakaan akademik di Amerika Serikat tentang penurunan persepsi nilai perpustakaan di mata pimpinan institusi. Ukuran nilai tradisional, seperti jumlah buku yang diedarkan atau program yang ditawarkan, tidak lagi memadai. Kini, perpustakaan akademik harus fokus pada hasil, terutama keberhasilan mahasiswa sebagai metrik kunci untuk menentukan kontribusi dan nilai mereka secara keseluruhan<sup>360</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Bell (2008) menunjukkan bahwa interaksi positif dengan dosen, administrator, dan staf perpustakaan berkontribusi pada retensi dan keberhasilan Mahasiswa<sup>361</sup>. Oleh karena itu, perpustakaan akademik perlu mengembangkan strategi untuk membangun hubungan dan melibatkan mahasiswa, seperti menawarkan program literasi informasi, lokakarya penelitian, dan ruang kolaborasi.

Pada tahun 2012 ACRL memulai upaya sistematis untuk mengukur dampak perpustakaan akademik terhadap pembelajaran dan keberhasilan mahasiswa. Dengan

---

<sup>360</sup> Frederick, J., & Wolff-Eisenberg, C. (2020). Ithaca S+ R US library survey 2019.

<sup>361</sup> Bell, Stephen J., and Joseph A. Salem Jr. 2017. "It's Up to the Librarians." "Pennsylvania Libraries: Research and Practice." doi:10.5195/pairap.2017.166.

dukungan dari Hibah Kepemimpinan Nasional selama tiga tahun dari Institute of Museum and Library Services (IMLS), inisiatif Assessment in Action (AiA) mensurvei lebih dari 200 institusi pasca sekolah menengah di Amerika Utara. Di antara temuan utama adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mendapat manfaat dari instruksi perpustakaan dalam kursus awal mereka. Instruksi literasi informasi yang diberikan kepada mahasiswa selama kursus awal mereka membantu mereka memperoleh seperangkat kompetensi umum untuk studi sarjana mereka.
2. Penggunaan perpustakaan meningkatkan keberhasilan mahasiswa. Analisis beberapa titik data (misalnya, sirkulasi, kehadiran sesi instruksi perpustakaan, akses database online, penggunaan ruang belajar, pinjaman antar perpustakaan) menunjukkan bahwa mahasiswa yang menggunakan perpustakaan dalam beberapa cara mencapai tingkat keberhasilan akademik yang lebih tinggi (misalnya, IPK, nilai kursus, retensi) daripada mahasiswa yang tidak menggunakan perpustakaan.
3. Program dan layanan akademik kolaboratif yang melibatkan perpustakaan meningkatkan pembelajaran mahasiswa. Kemitraan perpustakaan akademik dengan unit kampus lainnya, seperti pusat penulisan, pengayaan akademik, dan lab pidato, menghasilkan manfaat positif bagi mahasiswa (misalnya, nilai yang lebih tinggi, kepercayaan akademik, retensi).
4. Instruksi literasi informasi memperkuat hasil pendidikan umum. Perpustakaan meningkatkan hasil pendidikan umum institusi mereka dan menunjukkan bahwa literasi informasi berkontribusi pada pembelajaran berbasis inkuiri dan pemecahan masalah, termasuk pemikiran kritis, penalaran etis, pemahaman global, dan keterlibatan sipil. (ACRL 2016a, 1-2)<sup>362</sup>

Penelitian selanjutnya telah memperkuat temuan ini. Sebagai contoh, Murray, Ireland, dan Hackathorn (2016) menemukan bahwa penggunaan perpustakaan, dalam bentuk apapun, berkontribusi pada peningkatan retensi mahasiswa tahun pertama dan kedua.<sup>363</sup> Selain itu, Gaha, Hinnefeld, dan Pellegrino (2018) juga menemukan korelasi positif antara penggunaan perpustakaan dan IPK saat kelulusan.<sup>364</sup>

Perpustakaan akademik saat ini harus menunjukkan nilai mereka untuk mengajar dan penelitian sekaligus untuk belajar mahasiswa. Tetapi tidak ada

---

<sup>362</sup> ACRL [Association of College and Research Libraries]. 2016a. Documented Library Contributions to Student Learning and Success: Building Evidence with Team-Based Assessment in Action Campus Projects. Prepared by Karen Brown with contributions by Kara J. Malenfant. Chicago: Association of College and Research Libraries

<sup>363</sup> Murray, A., Ireland, A., & Hackathorn, J. (2016). The value of academic libraries: Library services as a predictor of student retention. *College & Research Libraries*, 77(5), 631-642.

<sup>364</sup> Gaha, Ula, Suzanne Hinnefeld, and Catherine Pellegrino. 2018. "The Academic Library's Contribution to Student Success: Library Instruction and GPA." *College and Research Libraries* 79 (September): 737-46.

keraguan bahwa menunjukkan hubungan positif antara perpustakaan dan retensi mahasiswa dan kesuksesan memberikan bukti kuat untuk dukungan perpustakaan yang berkelanjutan.

---

### 7. 6. 3 Perubahan Peran Fungsi Referensi Dan Pustakawan Referensi

Dalam era transformasi akses informasi dari bahan fisik ke objek digital, peran pustakawan referensi mengalami evolusi yang signifikan. Meskipun mahasiswa dan fakultas kini dapat mengakses informasi dari berbagai platform digital seperti Google, Google Scholar, dan database online, peran pustakawan referensi tidaklah hilang; sebaliknya, peran mereka semakin beragam dan penting. Pustakawan referensi tidak hanya menjawab pertanyaan referensi, tetapi juga terlibat dalam instruksi literasi informasi, penyusunan panduan perpustakaan, manajemen layanan perpustakaan tertanam, pemanfaatan media sosial, serta penyediaan layanan pengarsipan digital dan repositori institusional Royani & Rahayu (2020).<sup>365</sup>

Peran pustakawan sebagai kreator konten digital juga menjadi aspek penting dalam menghadapi transformasi ini. Mereka harus mampu mengelola konten digital dengan baik dan memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan akademik dan penelitian. Selain itu, pustakawan juga harus dapat berperan sebagai teman karib dalam proses pembelajaran, membantu mahasiswa dan fakultas menemukan referensi ilmiah dan buku yang diperlukan (Qibthiyah, 2020).<sup>366</sup>

Dalam konteks Indonesia, regulasi terkait peran pustakawan diatur dalam UU No. 43 Tahun 2007. Undang-undang ini menjelaskan tugas dan tanggung jawab pustakawan dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, termasuk dalam konteks transformasi digital yang sedang terjadi (Risnawati et al. , 2022)<sup>367</sup>. Dengan demikian, pustakawan perlu terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk dapat menghadapi tantangan baru dan memenuhi kebutuhan informasi dari pengguna perpustakaan di era digital ini.

Melalui penelitian dan praktik terbaik yang relevan, pustakawan referensi dapat terus berperan sebagai garda terdepan dalam menyediakan akses informasi yang berkualitas, mendukung literasi informasi, dan memastikan layanan perpustakaan tetap relevan dan efektif dalam mendukung kegiatan akademik dan penelitian di perguruan tinggi.

Perkembangan teknologi informasi, meningkatnya pendidikan online, keterbatasan anggaran, dan kebutuhan akan akses informasi yang lebih mudah dan

---

<sup>365</sup> Rahayu, Y. R. R. N. (2020). Transformasi Peran Pustakawan Di Lembaga Penelitian Dan Akademik. *Jurnal Perpustakaan Pertanian Vol, 29(2)*, 73-79.

<sup>366</sup> Qibthiyah, M. (2020). Peran pustakawan sebagai teman karib (tempat efektif menemukan aneka referensi ilmiah dan buku) dalam pembelajaran. *Pustakaloka, 12(2)*, 203-214.

<sup>367</sup> Risnawati, I., & Dakhalan, A. M. (2022). Peran Pustakawan dalam Mewujudkan Visi dan Misi Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Inkunabula: Journal of Library Science and Islamic Information, 1(1)*, 12-19.

cepat telah mendorong perubahan dan perluasan peran pustakawan referensi. Pustakawan referensi saat ini dituntut untuk memiliki keterampilan yang lebih luas, termasuk kemampuan dalam merancang instruksional, mengajar, melakukan penelitian, mengelola koleksi, menjadi kurator data, berkomunikasi, memasarkan layanan perpustakaan, mengelola proyek, dan mengembangkan web. (Bandyopadhyay dan Boyd-Byrnes 2016)<sup>368</sup>. Karena peran pustakawan referensi telah berkembang, keterampilan yang dibutuhkan dari mereka juga meningkat. Detmering dan Sproles (2012) menemukan bahwa pustakawan referensi tingkat pemula melakukan berbagai tanggung jawab termasuk perancang instruksional, guru kelas, asisten peneliti, spesialis koleksi, kurator data, pakar komunikasi, konsultan pemasaran, pengawas program, manajer proyek, dan pengembang web.<sup>369</sup>

Tugas-tugas pustakawan referensi telah berkembang seiring waktu. Beberapa tugas baru mereka meliputi:

1. Memberikan instruksi literasi informasi: Mengajar mahasiswa dan fakultas tentang bagaimana menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan sumber daya informasi secara efektif, baik dalam konteks kelas maupun secara individu.
2. Menyiapkan panduan perpustakaan dan sumber daya instruksional: Membuat panduan, tutorial, atau materi pembelajaran lainnya yang membantu pengguna perpustakaan memahami dan memanfaatkan sumber daya cetak dan digital yang tersedia.
3. Menyediakan layanan perpustakaan tertanam (embedded librarianship): Bekerja sama secara langsung dengan departemen akademik atau program studi tertentu untuk memberikan dukungan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
4. Mengembangkan kehadiran di media sosial: Menggunakan platform media sosial untuk berkomunikasi dengan pengguna, mempromosikan layanan perpustakaan, dan berbagi informasi yang relevan.
5. Menyediakan pengarsipan digital dan layanan repositori institusional: Mengelola dan memelihara koleksi digital perpustakaan, termasuk arsip digital dan repositori institusional, untuk memastikan aksesibilitas dan pelestarian jangka panjang. (Bandyopadhyay dan Boyd-Byrnes 2016).<sup>370</sup>

Perubahan ini menunjukkan bahwa peran pustakawan referensi semakin luas dan kompleks, tidak hanya berfokus pada layanan referensi tradisional, tetapi juga

---

<sup>368</sup> Bandyopadhyay, A., & Boyd-Byrnes, M. K. (2016). Is the Need for Mediated Reference Service in Academic Libraries Fading Away in the Digital Environment? *Reference Services Review*, 44(4), 596-626.

<sup>369</sup> Detmering, R., & Sproles, C. (2012). Forget the desk job: current roles and responsibilities in entry-level reference job advertisements.

<sup>370</sup> Bandyopadhyay, A., & Boyd-Byrnes, M. K. (2016). Is the Need for Mediated Reference Service in Academic Libraries Fading Away in the Digital Environment? *Reference Services Review*, 44(4), 596-626.

mencakup berbagai tugas yang berkaitan dengan teknologi, pengajaran, dan pengelolaan informasi digital.

Perubahan dalam cara mahasiswa dan fakultas mengakses informasi telah menyebabkan perubahan signifikan dalam layanan referensi perpustakaan akademik. Saat ini, meja referensi tradisional tidak lagi menjadi satu-satunya tempat interaksi antara pustakawan dan pengguna. Meskipun jumlah pertanyaan referensi yang diajukan secara langsung menurun, pustakawan referensi tetap berperan penting dalam membantu pengguna menemukan informasi yang mereka butuhkan (Connaway et al. , 2017).<sup>371</sup>

Untuk beradaptasi dengan perubahan ini, perpustakaan akademik telah menerapkan sistem "berjenjang" di mana staf non-profesional seperti paraprofesional atau mahasiswa menangani pertanyaan sederhana, sementara pustakawan profesional siap memberikan bantuan untuk pertanyaan yang lebih kompleks (Rubin & Rubin, 2020). Pendekatan ini memungkinkan pustakawan untuk fokus pada tugas-tugas yang memerlukan keahlian mereka, seperti mengembangkan panduan perpustakaan, memberikan instruksi literasi informasi, dan terlibat dalam layanan perpustakaan tertanam (Bandyopadhyay & Boyd-Byrnes, 2016).<sup>372</sup>

Meskipun ada perdebatan tentang relevansi meja referensi tradisional di era digital, kontak manusia tetap menjadi elemen penting dalam layanan referensi. Pustakawan referensi semakin meningkatkan interaksi mereka dengan mahasiswa dan fakultas, baik secara langsung maupun melalui platform digital, untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien (Connaway et al. , 2017

---

#### 7. 6. 4 Krisis Penerbitan dan Komunikasi Ilmiah

Krisis penerbitan ilmiah, yang ditandai dengan monopoli penerbit komersial dan kenaikan harga jurnal yang tak terkendali, telah memicu perubahan besar dalam lanskap publikasi akademik. Fenomena ini, yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, juga relevan di Indonesia. Akademisi dan lembaga penelitian di Indonesia menghadapi kesulitan dalam mengakses hasil penelitian terbaru karena tingginya biaya berlangganan jurnal. Situasi ini menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan membatasi penyebaran pengetahuan kepada masyarakat luas.

Peningkatan pendanaan untuk pendidikan tinggi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an memicu lonjakan publikasi ilmiah di jurnal akademik, yang menjadi sarana utama penyebaran pengetahuan. Penerbitan jurnal tradisional telah lama didukung oleh konvensi yang mapan tentang pengukuran produktivitas fakultas untuk masa jabatan dan promosi (misalnya, publikasi di jurnal yang sudah mapan).

---

<sup>371</sup> Connaway, L. S., Kitzie, V., Hood, E. M., & Harvey, W. (2017). *The Many Faces of Digital Visitors and Residents: Facets of Online Engagement*. Dublin, OH: OCLC Research.

<sup>372</sup> Bandyopadhyay, Aditi, and Mary Kate Boyd-Byrnes. (2016). *Is the Need for Mediated Reference Service in Academic Libraries Fading Away in the Digital Environment?* *Reference Services Review*, 44, 596-626.

Publikasi di jurnal bergengsi meningkatkan reputasi para sarjana. Selain itu, banyak asosiasi profesional memiliki kepentingan dalam menerbitkan jurnal karena mereka mempertahankan hak cipta dan menghasilkan pendapatan bagi organisasi (Frankland dan Ray 2017).<sup>373</sup>

Namun, pada akhir abad ke-20, sebagian besar jurnal ilmiah dimiliki oleh penerbit komersial, dan dalam beberapa kasus, terutama di bidang sains, teknologi, dan kedokteran, oleh beberapa penerbit besar. Monopoli ini mengakibatkan kenaikan biaya berlangganan yang signifikan dan berulang, seringkali mencapai 10% per tahun. Akibatnya, anggaran perpustakaan tertekan, dan untuk terus mendukung pembelian berkala, anggaran untuk buku dan monografi lainnya menurun drastis. Situasi ini, yang dikenal sebagai "krisis dalam penerbitan ilmiah", menjadi tidak tertahankan pada akhir abad ke-20 (Yiotis 2005).<sup>374</sup>

Krisis dalam penerbitan ilmiah yang dipicu oleh monopoli penerbit komersial dan kenaikan harga yang tak terkendali telah mendorong perubahan paradigma dalam sistem publikasi. Sebagai respons terhadap tantangan ini, muncul prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk menciptakan sistem publikasi yang lebih adil, terjangkau, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini mencakup pengendalian biaya publikasi, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas, keseimbangan hak cipta, serta fokus pada kualitas dan privasi.

Menanggapi krisis penerbitan ilmiah yang dipicu oleh monopoli penerbit komersial dan kenaikan harga yang tak terkendali, Asosiasi Perpustakaan Penelitian (Association of Research Libraries), bersama dengan beberapa universitas terkemuka seperti Johns Hopkins, Indiana, dan Pennsylvania State, serta lembaga penelitian dan akademik lainnya, mengadakan pertemuan pada bulan Maret 2000 untuk membahas solusi. Hasil pertemuan tersebut adalah sembilan Prinsip untuk Sistem yang muncul dari Penerbitan Ilmiah, yang dikenal sebagai Deklarasi Tempe (Case 2010)<sup>375</sup>. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfokus pada masalah biaya, tetapi juga mencakup aspek-aspek penting lainnya dalam penerbitan ilmiah, seperti proses evaluasi dan peer-review, pelestarian karya ilmiah, penetapan hak penerbitan, dan perlindungan privasi individu. Dengan demikian, Deklarasi Tempe menjadi tonggak penting dalam upaya mereformasi sistem penerbitan ilmiah agar lebih adil, terjangkau, dan berkelanjutan.

Pelajaran yang dapat diambil untuk perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia adalah perlunya gerakan akses terbuka

---

## 7. 6. 5 Gerakan Akses Terbuka

---

<sup>373</sup> Frankland, J., & Ray, M. A. (2017). Traditional versus open access scholarly journal publishing: An economic perspective. *Journal of Scholarly Publishing*, 49(1), 5-25.

<sup>374</sup> Yiotis, Kristin. (2005). The Open Access Initiative: A New Paradigm for Scholarly Communications. *Information Technology and Libraries*, 24, 157-162.

<sup>375</sup> Case, Mary M. (2010). Principles for Emerging Systems of Scholarly Publishing. Retrieved from [www.arl.org/bm~doc/principles.pdf](http://www.arl.org/bm~doc/principles.pdf).

Krisis penerbitan ilmiah yang ditandai dengan monopoli penerbit komersial dan kenaikan harga jurnal yang tidak terkendali telah mendorong perubahan besar dalam lanskap publikasi akademik. Para akademisi dan lembaga penelitian menghadapi kesulitan dalam mengakses hasil penelitian terbaru karena tingginya biaya berlangganan jurnal. Situasi ini menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan membatasi penyebaran pengetahuan kepada masyarakat luas.

Sebagai respons terhadap krisis ini, gerakan akses terbuka (OA) muncul sebagai alternatif yang menjanjikan. Gerakan ini bertujuan untuk membuat hasil penelitian ilmiah dapat diakses secara bebas dan terbuka oleh siapa saja, tanpa hambatan biaya atau pembatasan hak cipta yang ketat. OA menawarkan berbagai manfaat, mulai dari meningkatkan visibilitas dan dampak penelitian hingga mempercepat laju penemuan ilmiah. Salah satu organisasi yang berperan penting dalam mendorong OA adalah Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC).

Gerakan open access (OA) juga muncul sebagai respon atas krisis penerbitan ilmiah. Prinsip yang mendasari OA adalah bahwa penelitian ilmiah adalah barang publik yang harus dibagikan tanpa dibatasi oleh kendala ekonomi atau kekayaan intelektual. Di antara banyak manfaatnya, OA (1) meningkatkan peluang penemuan karena tidak ada hambatan akses bagi peneliti; (2) memungkinkan masyarakat (wajib pajak) untuk melihat hasil investasinya; dan (3) meningkatkan pendidikan dengan menyebarkan penelitian untuk guru dan siswa (PLOS 2019)<sup>376</sup>. Selain itu, di dunia di mana reputasi ilmiah dan kriteria kepemilikan tidak hanya mencakup ukuran tradisional, seperti jumlah publikasi atau frekuensi penggunaan dan kutipan, tetapi juga ukuran alternatif baru (altmetrik), seperti penyebutan di media sosial, atau tampilan halaman, akses terbuka dapat mendorong keberhasilan fakultas (Avery, Holzman, dan Brown 2017).<sup>377</sup>

Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), sebuah inisiatif internasional yang didirikan pada tahun 1998, adalah pendukung awal akses terbuka. SPARC bekerja untuk memungkinkan berbagi hasil penelitian dan materi pendidikan secara terbuka, dengan tujuan mendemokratisasi akses ke pengetahuan, mempercepat penemuan, dan meningkatkan pengembalian investasi dalam penelitian dan pendidikan (SPARC, 2019a: 1-2)<sup>378</sup>

SPARC berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penulis, penerbit, perpustakaan, mahasiswa, penyandang dana, pembuat kebijakan, dan masyarakat, untuk mendorong perubahan infrastruktur dan budaya yang diperlukan untuk menjadikan keterbukaan sebagai standar dalam penelitian dan pendidikan.

---

<sup>376</sup> PLOS (Public Library of Science). (2019). Benefits of Open Access Journals. Retrieved from <https://www.plos.org/open-access>.

<sup>377</sup> Avery, Marguerite, Alex Holzman, and Robert Brown. (2017). Special Issue on Open Access. *Journal of Scholarly Publishing*, 49(October), 1-4.

<sup>378</sup> SPARC. (2019a). Who We Are. Retrieved from <https://sparcopen.org/who-we-are>.

SPARC berfokus pada empat area, atau "pilar":

1. Advokasi—mendukung perubahan kebijakan dan penelitian yang mempromosikan akses terbuka, dan bekerja dengan penyandang dana dan koalisi untuk mendorong akses terbuka.
2. Pendidikan—mempromosikan pemahaman yang luas tentang akses terbuka melalui kertas putih dan sumber daya yang mendukung penerapan akses terbuka, menyediakan forum dan lokakarya untuk membantu anggota dalam memajukan prinsip-prinsip akses terbuka, dan berkomunikasi dengan media mengenai tujuan dan kegiatan SPARC.
3. Kolaborasi—bekerja dengan pemangku kepentingan untuk mendukung akses terbuka, mempromosikan konferensi untuk berbagi ide akses terbuka, dan berpartisipasi dalam koalisi akses terbuka lainnya dan komite eksekutif mereka.
4. Inkubasi—membantu pengembangan model bisnis baru yang dapat mendukung akses terbuka, memantau hambatan yang mencegah akses terbuka seperti paywalls untuk materi penelitian, dan mempromosikan proyek baru yang membuat sumber daya ilmiah lebih mudah diakses. (SPARC 2019c)<sup>379</sup>

Pada tahun 2002 pendukung OA bertemu di Budapest dan mengadopsi Budapest Open Access Initiative (BOAI), yang merekomendasikan dua strategi: (1) pengarsipan sendiri dan (2) membuat jurnal akses terbuka baru dan membantu jurnal saat ini dalam transisi ke OA (BOA. 2002)<sup>380</sup>. Ini diikuti pada tahun 2003 oleh Deklarasi Berlin tentang Akses Terbuka ke Pengetahuan dalam Sains dan Humaniora, yang mendorong para peneliti dan penerima hibah untuk mempublikasikan temuan mereka di jurnal dan repositori akses terbuka.

Dengan "akses terbuka", yang kami maksud adalah ketersediaan gratisnya di internet publik yang memungkinkan setiap pengguna untuk membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel ini, merangkak mereka untuk pengindeksan, meneruskannya sebagai data ke perangkat lunak, atau menggunakannya untuk tujuan lain yang sah, tanpa hambatan finansial, hukum, atau teknis selain yang tidak dapat dipisahkan dari mendapatkan akses ke internet itu sendiri. Satu-satunya batasan pada reproduksi dan distribusi, dan satu-satunya peran hak cipta dalam domain ini, adalah memberikan kontrol kepada penulis atas integritas karya mereka dan hak untuk diakui dan dikutip dengan benar. (BOAI 2002, 1)<sup>381</sup>

Deklarasi tersebut juga merekomendasikan agar universitas memastikan bahwa keterbukaan akses publikasi dievaluasi dengan baik dalam proses promosi

---

<sup>379</sup>SPARC.(2019c).What We Do. Retrieved from <https://sparcopen.org/what-sparc-does>.

<sup>380</sup> BOAI (Budapest Open Access Initiative). (2002). Read the Budapest Open Access Initiative.

<sup>381</sup> BOAI (Budapest Open Access Initiative). (2012). Ten Years on from the Budapest Open Access Initiative: Setting the Default to Open.

dan kepemilikan (Max Planck Institute 2003)<sup>382</sup>. Sepuluh tahun setelah pernyataan BOAI, sebagai pengakuan atas pematangan dan dukungan yang berkembang untuk OA, pernyataan kedua, BOAI10, menegaskan kembali dua strategi dan membahas secara lebih rinci masalah yang berkaitan dengan kebijakan, perizinan, infrastruktur teknologi, dan advokasi kualitas tinggi publikasi dan standar akses terbuka (BOAI 2012).<sup>383</sup>

Koalisi Lembaga Kebijakan Akses Terbuka (COAPI) yang dibentuk tahun 2011 melengkapi kegiatan tersebut. COAPI berfokus pada inisiatif yang dipimpin fakultas di institusi atau departemen yang telah mengadopsi kebijakan akses terbuka. COAPI adalah organisasi informal dengan lebih dari 100 anggota institusional di Kanada dan Amerika Serikat. Meskipun tidak ada biaya keanggotaan, anggota harus berkomitmen untuk mengikuti empat prinsip:

1. Penyebarluasan penelitian ilmiah secara online langsung dan bebas hambatan yang menghasilkan pertumbuhan pengetahuan baru yang lebih cepat, peningkatan dampak penelitian, dan peningkatan pengembalian investasi penelitian publik
2. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan akses terbuka kelembagaan
3. Berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengembangan dan implementasi Kebijakan Akses Terbuka dengan individu di institusi yang tertarik untuk menumbuhkan budaya akses terbuka
4. Membina sistem komunikasi keilmuan yang lebih terbuka melalui perubahan budaya dan legislatif di tingkat lokal, nasional, dan internasional (COAPI 2019, 1)<sup>384</sup>

Pada tingkat internasional yang lebih luas, pada tahun 2018, sebuah koalisi internasional penyandang dana penelitian, yang disebut coALition S (<https://www.coalition-s.org>) didirikan untuk membuat publikasi penelitian yang didanai hibah, peer-review, tersedia di lingkungan akses terbuka. Koalisi memiliki prinsip utama:

Mulai tahun 2021, semua publikasi ilmiah tentang hasil penelitian yang didanai oleh hibah publik atau swasta yang disediakan oleh dewan penelitian dan badan pendanaan nasional, regional dan internasional, harus diterbitkan dalam Jurnal Akses Terbuka, pada Platform Akses Terbuka, atau segera tersedia melalui Repositori Akses Terbuka tanpa embargo. (coALition S 2019, 1)<sup>385</sup>

---

<sup>382</sup> Max Planck Institute. (2003). Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.

<sup>383</sup> BOAI (Budapest Open Access Initiative). (2012). Ten Years on from the Budapest Open Access Initiative: Setting the Default to Open

<sup>384</sup> COAPI. (2019). About COAPI. Retrieved from <https://sparcopen.org/coapi/about/#principles>

<sup>385</sup> coALition S. (2019). Plan S: Making Full and Immediate Open Access a Reality. Retrieved from <https://www.coalition-s.org/about>

COALitionS juga mendorong untuk dibuat jenis data penelitian lainnya tersedia secara terbuka bila memungkinkan dan secepat mungkin. Meskipun tujuan dari semua kelompok ini adalah akses bebas dan terbuka, bahkan di dunia akses terbuka, seseorang harus membayar biaya yang terkait dengan publikasi digital dan administrasi item digital. Sebenarnya, ada beberapa "model bisnis". Misalnya, beberapa peneliti menerbitkan jurnal tradisional yang mengizinkan akses terbuka "terbatas"; yaitu, penerbit membuat artikel tersedia tanpa biaya hanya setelah periode embargo yang ketat—seringkali satu hingga dua tahun—sehingga memastikan bahwa langganan tetap diinginkan (Opensource. com 2019; Bjork 2017)<sup>386</sup>. Dalam akses terbuka hijau, penerbit memberikan hak tertentu kepada penulis atas penerimaan artikel. Penulis mungkin dapat memberikan pracetak atau draf naskah; post-print, yaitu versi naskah yang diajukan untuk dicetak; atau PDF dari versi yang diterbitkan (Mallon 2016)<sup>387</sup>.

Dalam pengaksesan terbuka hijau, penulis dapat memposting di situs web mereka sendiri (pengarsipan sendiri), atau di repositori institusi, atau di beberapa arsip lain yang tersedia untuk umum. Beberapa universitas, terutama di Eropa, mengharuskan penulis untuk mengunggah karya mereka ke repositori institusional, tetapi kebijakan akses terbuka wajib di Amerika Serikat jarang terjadi, sebagian karena sifat universitas Amerika yang terdesentralisasi, banyaknya institusi swasta, dan konvensi yang kuat terkait dengan kebebasan akademik (Anderson 2016)<sup>388</sup>.

Akses terbuka emas adalah pendekatan lain. Dalam model ini, penerbit membuat artikel tersedia secara bebas tetapi membiayai biaya publikasi dengan membebaskan biaya publikasi kepada penulis atau institusi mereka. Biaya, yang dikenal sebagai biaya pemrosesan artikel (APC), mungkin dikenakan pada jurnal akses terbuka atau jurnal tradisional. Ketika biaya publikasi diperlukan, terutama dari jurnal yang secara tradisional mempertahankan kontrol hak cipta, praktik ini disebut sebagai akses terbuka hibrida. Meskipun pendekatan emas dan akses terbuka hibrida menjadi semakin populer (Opensource. com 2019; Owen 2017<sup>389</sup>), ada beberapa bukti bahwa APC bisa dua setengah kali lebih mahal untuk institusi daripada akses terbuka hijau (Johnson, Pinfield, dan Fosci 2015).<sup>390</sup>

Saat ini, diperkirakan 35-50% dari semua artikel penelitian dapat diakses melalui berbagai jalur akses terbuka, termasuk akses hijau, emas, atau hibrida.

---

<sup>386</sup> Bjork, B.-C. (2017). Gold, green, and black open access. *Learned Publishing*, 30(2), 173-175.

<sup>387</sup> Mallon, M. (2016). Open access publishing and scholarship. *Public Services Quarterly*, 12(2), 125-139.

<sup>388</sup> Anderson, R. (2016). Why are there virtually no mandatory open access policies at American universities? *Learned Publishing*, 29, 215-218.

<sup>389</sup> Opensource.com. (2019). What is open access? Retrieved from <https://opensource.com/resources/what-open-access>.

<sup>390</sup> Johnson, R., Pinfield, S., & Fosci, M. (2015). Business process costs of implementing 'Gold' and 'Green' open access in institutional and national contexts. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 67, 2283-2295.

Selain itu, terdapat juga pendekatan yang disebut akses terbuka hitam, yang disediakan oleh situs-situs jaringan sosial akademik (ASN) seperti Sci-Hub dan ResearchGate (Bjork, 2017)<sup>391</sup>. Meskipun memberikan akses luas ke materi ilmiah, praktik ASN seringkali dipertanyakan terkait masalah hak cipta. Selain itu, banyak ASN beroperasi sebagai perusahaan kapitalis ventura dengan motif komersial yang kuat (Bjork, 2016).<sup>392</sup>

Tren serupa juga terlihat pada perusahaan komersial yang mengumpulkan dan menyediakan akses ke jurnal akademik dengan biaya yang cukup besar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa akses terbuka mungkin dimanfaatkan oleh ASN dan penerbit jurnal komersial besar untuk keuntungan mereka sendiri (Bjork, 2016). Perusahaan besar seperti Elsevier telah memperluas jangkauan mereka ke seluruh siklus hidup penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga penyimpanan institusional. Konsolidasi ini telah mengalihkan kontrol dari universitas dan asosiasi profesional ke perusahaan komersial yang lebih berorientasi pada keuntungan daripada penyebaran pengetahuan demi kepentingan publik (Joseph, 2018).<sup>393</sup>

Krisis penerbitan ilmiah terus berlanjut, dengan biaya jurnal tahunan yang terus meningkat sekitar 6% dan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan. Ketergantungan pada jurnal non-akses terbuka (non-OA) tetap tinggi karena tradisi akademik yang menghargai reputasi jurnal dan pengaruhnya dalam proses mendapatkan jabatan tetap dan promosi. Hal ini, ditambah dengan tekanan anggaran yang semakin meningkat pada perpustakaan akademik, menimbulkan tantangan besar dalam mempertahankan komunikasi ilmiah di perguruan tinggi dan universitas (Bosch, Albee, & Henderson, 2018)<sup>394</sup>. Oleh karena itu, penting bagi perpustakaan akademik dan pustakawan untuk secara aktif memantau perkembangan gerakan akses terbuka dan bekerja sama dengan organisasi seperti SPARC untuk mengadvokasi lingkungan penelitian yang lebih terbuka.

Gerakan akses terbuka (OA) muncul sebagai respons terhadap krisis penerbitan ilmiah, dengan prinsip bahwa penelitian ilmiah adalah barang publik yang harus dibagikan secara terbuka. OA menawarkan berbagai manfaat, termasuk meningkatkan peluang penemuan, memungkinkan masyarakat melihat hasil investasi mereka, dan meningkatkan pendidikan dengan menyebarkan penelitian. Selain itu, OA dapat mendorong keberhasilan fakultas dengan meningkatkan visibilitas dan dampak penelitian mereka melalui metrik alternatif

---

<sup>391</sup> Bjork, B.-C. (2017). Gold, green, and black open access. *Learned Publishing*, 30(2), 173-175

<sup>392</sup> Bjork, B.-C. (2017). Gold, green, and black open access. *Learned Publishing*, 30(2), 173-175

<sup>393</sup> Joseph, H. (2018). Securing Community-Controlled Infrastructure. *College and Research Libraries News*, 79, 426-429.

<sup>394</sup> Bosch, S., Albee, B., & Henderson, K. (2018). Death by 1,000 Cuts. *Library Journal*, (April 15), 28-33.

seperti penyebutan di media sosial dan jumlah tampilan halaman (Avery, Holzman, & Brown, 2017).

Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), sebuah inisiatif internasional, menjadi pendukung awal OA dan bekerja untuk memungkinkan berbagi hasil penelitian dan materi pendidikan secara terbuka. SPARC berfokus pada empat pilar: advokasi, pendidikan, kolaborasi, dan inkubasi untuk menjadikan keterbukaan sebagai standar dalam penelitian dan pendidikan.

Budapest Open Access Initiative (BOAI) pada tahun 2002 merekomendasikan dua strategi utama untuk mencapai OA: pengarsipan sendiri dan pembuatan jurnal akses terbuka baru. Deklarasi Berlin tentang Akses Terbuka ke Pengetahuan dalam Sains dan Humaniora pada tahun 2003 mendorong para peneliti untuk mempublikasikan temuan mereka di jurnal dan repositori akses terbuka.

Meskipun OA telah mendapatkan momentum, tantangan tetap ada, termasuk biaya pemrosesan artikel (APC) yang tinggi dalam model akses terbuka emas dan masalah hak cipta yang terkait dengan akses terbuka hitam melalui situs jaringan sosial akademik. Selain itu, konsolidasi pasar penerbitan oleh perusahaan komersial besar menimbulkan kekhawatiran tentang kontrol dan keuntungan yang lebih besar daripada penyebaran pengetahuan untuk kepentingan publik.

Pelajaran penting bagi perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia adalah perlunya adaptasi terhadap perubahan lanskap akademik global, terutama dalam hal aksesibilitas dan keterbukaan informasi ilmiah. Penerapan prinsip-prinsip akses terbuka (Open Access/OA) menjadi salah satu strategi kunci untuk meningkatkan visibilitas, dampak, dan kolaborasi riset yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

1. Mendorong Akses Terbuka: Perpustakaan perguruan tinggi dapat menjadi ujung tombak dalam mendorong akses terbuka dengan mengadopsi kebijakan yang mendukung akses terbuka terhadap penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa. Ini dapat dilakukan melalui repositori institusional, di mana hasil penelitian disimpan dan dapat diakses secara bebas oleh publik. Selain itu, perpustakaan dapat mempromosikan jurnal akses terbuka dan berkolaborasi dengan inisiatif OA lainnya.
2. Menyeimbangkan Biaya dan Manfaat: Dalam menerapkan akses terbuka, perpustakaan perlu mempertimbangkan dengan cermat model yang paling sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya mereka. Model akses terbuka hijau (pengarsipan sendiri) mungkin lebih terjangkau, sementara model akses terbuka emas (dengan Article Processing Charges/APC) dapat memberikan visibilitas dan dampak yang lebih besar. Perpustakaan perlu melakukan analisis biaya-manfaat untuk menentukan model yang optimal.
3. Kolaborasi: Kolaborasi dengan organisasi seperti SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) dan partisipasi dalam koalisi akses terbuka dapat memperkuat advokasi dan memfasilitasi pertukaran praktik terbaik dalam penerapan akses terbuka. Perpustakaan dapat belajar dari pengalaman perguruan tinggi lain dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan bersama.

4. Pengembangan Infrastruktur: Untuk mendukung akses terbuka, perpustakaan perlu mengembangkan infrastruktur yang memadai. Ini termasuk membangun dan memelihara repositori institusional yang kuat, mempromosikan jurnal akses terbuka berkualitas, dan memberikan pelatihan kepada dosen dan mahasiswa tentang praktik terbaik dalam penerbitan akses terbuka. Infrastruktur yang kuat akan memastikan kelancaran implementasi dan keberlanjutan inisiatif akses terbuka.
5. Evaluasi Kebijakan: Terakhir, perpustakaan perlu secara berkala mengevaluasi kebijakan dan praktik penerbitan mereka. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip akses terbuka dan mendukung penyebaran pengetahuan yang lebih luas. Perpustakaan dapat melakukan survei, analisis data, dan studi kasus untuk mengukur dampak dari kebijakan akses terbuka dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip akses terbuka dan menerapkan strategi yang tepat, perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia dapat berperan penting dalam meningkatkan visibilitas dan dampak penelitian, memperluas akses terhadap pengetahuan, dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di tingkat nasional dan global.

---

## 7. 6. 6 Repositori Institusional

Repositori institusional didefinisikan sebagai seperangkat layanan yang ditawarkan universitas kepada anggota komunitasnya untuk mengelola dan menyebarkan materi digital yang dibuat oleh institusi dan anggota komunitasnya. Pada dasarnya, repositori ini merupakan komitmen organisasi untuk memelihara materi digital ini, termasuk pelestarian jangka panjang jika diperlukan, serta pengorganisasian dan akses atau distribusi (Lynch, C.A. :2003,hal.328-9).<sup>395</sup> SPARC (2002) menekankan bahwa IR tidak hanya memusatkan dan melestarikan karya intelektual, tetapi juga membentuk bagian dari sistem global repositori yang terdistribusi, mendukung model baru penerbitan ilmiah.<sup>396</sup>

IR dapat berisi berbagai jenis dokumen, termasuk artikel jurnal, dokumen sejarah, gambar, makalah akademik, dan banyak lagi (Gonzales, 2018)<sup>397</sup>. Baughman, Roebuck, dan Arlitsch (2018) mengidentifikasi tiga alasan utama untuk membuat IR: mengumpulkan dan melestarikan karya intelektual institusi, meningkatkan visibilitas penelitian, dan menunjukkan komitmen terhadap akses

---

<sup>395</sup> Lynch, C. A. (2003). Institutional repositories: essential infrastructure for scholarship in the digital age. *portal: Libraries and the Academy*, 3(2), 327-336.

<sup>396</sup> SPARC. (2002). The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper. Prepared by Raym Crow. Washington, DC: SPARC.

<sup>397</sup> Gonzales, B. M. (2018). Institutional Repositories. CLIPP #44. Chicago: American Library Association, Association of College and Research Libraries. 6

terbuka<sup>398</sup>. IR dapat meningkatkan dampak dan reputasi peneliti dan institusi dengan memberikan akses yang mudah dan tidak terbatas ke karya ilmiah mereka (O'Brien et al., 2016)<sup>399</sup>. Gonzales (2018) juga menyoroti manfaat IR dalam meningkatkan diseminasi penelitian, pemasaran universitas, dan partisipasi dalam bentuk penerbitan baru. (hal. 4)<sup>400</sup>

Meskipun memiliki potensi besar, IR menghadapi beberapa tantangan dalam implementasinya (Lynch, 2017)<sup>401</sup>. Tantangan ini meliputi biaya operasional, resistensi dari fakultas, dan masalah teknis seperti pemeliharaan jangka panjang, anggaran, desain sistem, evaluasi, serta kebijakan dan praktik yang efektif (Quinn, 2010)<sup>402</sup>. Oleh karena itu, Lynch (2017) menyarankan agar IR tidak hanya berfokus pada pelestarian artikel jurnal, tetapi juga memperluas cakupannya untuk mencakup item lain yang berguna untuk komunikasi ilmiah, seperti tesis, disertasi, dan sumber daya pendidikan terbuka.<sup>403</sup>

---

### 7.6.7 Literasi Informasi, Metaliterasi, Dan Literasi Informasi Kritis

Literasi informasi menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks. Namun, literasi informasi tidaklah statis; konsep ini terus berkembang seiring dengan perubahan lanskap informasi dan teknologi. Untuk memahami lebih lanjut mengenai evolusi literasi informasi, kita perlu menelusuri perkembangannya dari konsep dasar hingga konsep yang lebih luas seperti metaliterasi dan literasi informasi kritis. Mari kita bahas lebih dalam ketiga konsep ini.

---

#### 7.6.7.1 Literasi Informasi

Peran pustakawan dalam memberikan instruksi telah lama diakui. Selama beberapa dekade, mereka telah membimbing pengguna perpustakaan melalui berbagai metode seperti lokakarya, kuliah kelas, dan panduan perpustakaan untuk

---

<sup>398</sup> Baughman, S., Roebuck, G., & Arlitsch, K. (2018). Reporting practices of institutional repositories: analysis of responses from two surveys. *Journal of Library Administration*, 58(1), 65-80.

<sup>399</sup> O'Brien, P., Arlitsch, K., Sterman, L., Mixer, J., Wheeler, J., & Borda, S. (2016). Undercounting File Downloads from Institutional Repositories. *Journal of Library Administration*, 56, 854-874.

<sup>400</sup> Gonzales, B. M. (2018). *Institutional Repositories*. CLIPP #44. Chicago: Association of College and Research Libraries, American Library Association.

<sup>401</sup> Lynch, C. (2017). Updating the Agenda for Academic Libraries and Scholarly Communications. *College and Research Libraries*, 78, 126-130.

<sup>402</sup> Quinn, B. (2010). Reducing Psychological Resistance to Digital Repositories. *Information Technology and Libraries*, 29(2), 67-75.

<sup>403</sup> Lynch, C. (2017). Updating the Agenda for Academic Libraries and Scholarly Communications. *College & Research Libraries*, 78(2), 126-130.

meningkatkan keterampilan pencarian informasi. Pada tahun 1970-an, instruksi ini berkembang menjadi "instruksi bibliografi" (BI), dengan fokus pada menemukan buku dan materi cetak lainnya. Seiring dengan perkembangan lingkungan pencarian yang semakin besar, canggih, dan kompleks, BI berevolusi menjadi "literasi informasi."<sup>404</sup>

Banyak individu yang merasa lebih mahir dalam mencari informasi daripada kenyataannya, sehingga peran pustakawan dalam memberikan literasi informasi menjadi semakin penting (Garrity, 2018)<sup>405</sup>. Laporan akhir Komite Kepresidenan ALA tentang Literasi Informasi mendefinisikan literasi informasi sebagai kemampuan seseorang untuk mengenali kebutuhan informasi dan memiliki kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tersebut secara efektif (ALA 1989, 1)<sup>406</sup>.

Pada tahun 2000 ACRL mengumumkan lima standar literasi informasi, seorang pencari pengetahuan harus mampu menunjukkan instruksi literasi berikut:

1. Tentukan sejauh mana informasi yang dibutuhkan.
2. Mengakses informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien.
3. Mengevaluasi informasi dan sumbernya secara kritis.
4. Menggunakan informasi secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu.
5. Memahami masalah ekonomi, hukum, dan sosial seputar penggunaan informasi, serta mengakses dan menggunakan informasi secara etis dan legal (ACRL 2000, 2-3)<sup>407</sup>.

ACRL secara resmi membatalkan standar ini pada tahun 2016 dan merumuskan "kerangka" baru untuk literasi informasi (ACRL 2016b). Kerangka tersebut memberikan landasan teoretis yang lebih kuat berdasarkan model pendidikan yang mengakui gaya belajar individu dan kelompok yang heterogen. Ini mencakup pencarian informasi dalam konteks yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat menciptakan, mengatur, dan menyebarkan informasi. Ini berpusat pada peserta didik daripada berpusat pada pustakawan dan menempatkan nilai signifikan pada kolaborasi, pembangunan komunitas, dan keadilan sosial. Akibatnya, kerangka kerja kurang berfokus pada perolehan seperangkat keterampilan mencari informasi tertentu (yaitu, standar ACRL 2000), dan lebih pada pemahaman pengetahuan dalam konteks sosialnya.

---

<sup>404</sup> Thomas, N. P., Crow, S. R., Henning, J. A., & Donham, J. (2020). *Information literacy and information skills instruction: new directions for school libraries*. Bloomsbury Publishing USA.

<sup>405</sup> Garrity, C. (2018). The New National School Library Standards: Implications for Information Literacy Instruction in Higher Education. *Journal of Academic Librarianship*, 44, 455-458.

<sup>406</sup> ALA Presidential Committee on Information Literacy. (1989). *Presidential Committee on Information Literacy: Final Report*.

<sup>407</sup> Association of College and Research Libraries (ACRL). (2000). *Information Literacy Competency Standards for Higher Education*. Chicago: ACRL/ALA.

Kerangka kerja ini didasarkan pada enam konsep "ambang" yang memberikan cara baru untuk mendekati atau melihat sesuatu. Dalam kasus literasi informasi, konsep berfungsi sebagai perspektif untuk terlibat dalam eksplorasi pengetahuan (Bravender, McClure, dan Schaub 2015). Berikut ini adalah enam konsep ambang batas untuk literasi informasi:

1. Otoritas dibangun dan kontekstual.
2. Penciptaan informasi adalah sebuah proses.
3. Informasi memiliki nilai.
4. Penelitian adalah penyelidikan.
5. Beasiswa adalah percakapan.
6. Pencarian adalah eksplorasi strategis. (ACRL 2016b)<sup>408</sup>

Dalam menerapkan kerangka kerja baru, pustakawan didorong untuk menggunakan strategi pembelajaran aktif yang melibatkan siswa. Misalnya, pemecahan masalah, pengajaran sebaya, dan bentuk keterlibatan lainnya direkomendasikan daripada ceramah (Forbes dan Keeran 2017). Penekanan ditempatkan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam proses pencarian dan evaluasi informasi, pada etika dan penggunaan informasi, dan pada pemahaman konteks di mana pengetahuan diciptakan. Misalnya, ketika mempertimbangkan konsep ambang bahwa "beasiswa adalah percakapan," siswa belajar bahwa beasiswa tidak ditentukan oleh artikel dalam database tetapi melibatkan wacana luas di antara para sarjana dengan minat yang sama. Wacana dapat ditemukan dalam artikel atau buku, tetapi juga dalam percakapan, pertemuan, blog, email, dan podcast. Ini termasuk menegaskan serta menentang sudut pandang (Bravender et al. 2015)<sup>409</sup>. Kerangka kerja mempromosikan pengaturan diri oleh siswa di mana mereka memantau kegiatan pencarian informasi mereka sendiri, menetapkan tujuan mereka sendiri, mengembangkan strategi mereka sendiri, dan mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Proses pengaturan diri ini disebut sebagai "metakognisi" (Fulkerson, Ariew, dan Jacobson 2017)<sup>410</sup>.

Meskipun banyak manfaatnya, kerangka kerja ACRL dan konsep ambang batas yang baru belum diterima oleh semua perpustakaan akademik. Faktanya, Julien, Gross, dan Latham (2018) menemukan bahwa instruksi literasi informasi di banyak institusi sebagian besar masih berbasis keterampilan, dengan fokus pada penggunaan database, strategi pencarian, dan penggunaan katalog online. Meskipun demikian, Farkas (2017a) mencatat bahwa kerangka kerja baru dapat memberikan

---

<sup>408</sup> ACRL (Association of College and Research Libraries). (2016b). Framework for Information Literacy for Higher Education.

<sup>409</sup> Bravender, P., McClure, H., & Schaub, G. (2015). Teaching Information Literacy: Threshold Concepts. Chicago: American Library Association, Association of College and Research Libraries.

<sup>410</sup> Fulkerson, D. M., Ariew, S. A., & Jacobson, T. E. (2017). Revisiting Metacognition and Metaliteracy in the ACRL Framework. *Communications in Information Literacy*, 11, 21-41.

wawasan baru dan bermakna ke dalam praktik literasi informasi kami dan bahwa penerapan kerangka kerja tidak berarti bahwa pustakawan harus menghentikan program literasi informasi mereka saat ini. Dia mengamati bahwa kerangka "menyediakan cara baru untuk melihat literasi informasi, apa yang kita lakukan sebagai guru, dan apa yang siswa kita lakukan sebagai pencari informasi" (54).<sup>411</sup>

---

#### 7.6.7.2 Metaliterasi

Literasi informasi telah berevolusi melampaui sekadar keterampilan dasar. Kini, literasi informasi mencakup konsep yang lebih luas yang dikenal sebagai "metaliterasi." Metaliterasi melibatkan kemampuan untuk memahami, mengelola, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis dan efektif dalam berbagai konteks. (Hamey, 2015)<sup>412</sup>

Metaliterasi mendorong pemikiran kritis dan kolaborasi dalam dunia online, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk berpartisipasi secara efektif dalam media sosial dan komunitas online. Ini adalah konsep terpadu yang mendukung akuisisi, produksi, dan berbagi pengetahuan dalam komunitas online kolaboratif. Metaliterasi melampaui pendekatan tradisional berbasis keterampilan untuk literasi informasi dengan mengakui berbagai jenis literasi terkait dan mengintegrasikan teknologi yang muncul (Mackey dan Jacobson, 2011, 62–63)<sup>413</sup>

Metaliterasi merupakan komponen penting dari kerangka ACRL dan mencakup tidak hanya literasi cetak, tetapi juga literasi visual, literasi digital, literasi seluler, dan literasi media. Ini adalah literasi yang diperlukan untuk navigasi dunia jaringan yang terhubung (Mackey dan Jacobson 2014).<sup>414</sup>

---

#### 7.6.7.3 Literasi Informasi Kritis

Literasi informasi telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perubahan lanskap informasi dan teknologi. Awalnya, literasi informasi berfokus pada keterampilan dasar dalam mencari dan mengakses informasi. Namun, seiring dengan kompleksitas informasi yang semakin meningkat, terutama di era digital, literasi informasi berkembang menjadi konsep yang lebih luas yang mencakup kemampuan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan menggunakan informasi secara kritis dan etis.

Perkembangan ini menjadi semakin mendesak di tengah maraknya misinformasi dan disinformasi yang beredar di platform digital, sehingga menuntut

---

<sup>411</sup> Farkas, M. (2017a). Framework Freakout? Engaging with the Framework for Information Literacy. *American Libraries*, 48(5), 54.

<sup>412</sup> Mackey, T. P., & Jacobson, T. E. (2014). *Metaliteracy: Reinventing information literacy to empower learners*. American Library Association.

<sup>413</sup> Mackey, T. P., & Jacobson, T. E. (2011). Reframing Information Literacy as a Metaliteracy. *College and Research Libraries*, 72, 62-78.

<sup>414</sup> Mackey, T. P., & Jacobson, T. E. (2014). *Metaliteracy: Reinventing Information Literacy to Empower Learners*. Chicago: American Library Association.

pendekatan literasi informasi yang lebih kritis dan holistik yang dikenal dengan Literasi Informasi Kritis

Literasi Informasi Kritis (CIL) adalah pendekatan yang muncul dari gerakan kepastakawanan kritis yang menyoroti bahwa informasi tidaklah netral, melainkan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan bias dalam masyarakat (Elmborg, 2006). CIL bertujuan untuk meningkatkan kesadaran individu akan ketidaksetaraan dan bias ini dalam penciptaan, produksi, dan penyebaran pengetahuan, termasuk dalam algoritma pencarian, pengklasifikasian, dan proses peer-review (Pashia, 2017)<sup>415</sup>. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi, refleksi, keterbukaan pikiran, dan eksplorasi berbagai perspektif, terutama yang berkaitan dengan keadilan sosial (Tewell, 2018).<sup>416</sup>

CIL merupakan pengembangan dari literasi fungsional dan interaktif, yang melibatkan keterampilan kognitif tingkat tinggi untuk menganalisis informasi secara kritis (Koltay, 2011)<sup>417</sup>. Hal ini termasuk kemampuan untuk membedakan kualitas situs web, mengevaluasi informasi kesehatan, dan menggunakan informasi yang berkualitas untuk membuat keputusan yang tepat. CIL juga berkaitan erat dengan literasi media, literasi digital, dan literasi kesehatan, yang bertujuan untuk mengajarkan individu untuk memahami pesan media secara kritis (Hsu et al., 2014).<sup>418</sup>

Dalam era digital, CIL menjadi semakin penting dalam menghadapi penyebaran misinformasi di lingkungan online. Kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis membantu individu mengidentifikasi dan mengatasi informasi yang tidak benar (Mackey & Jacobson, 2011)<sup>419</sup>. Hal ini sangat relevan dalam konteks literasi ilmiah dan literasi kesehatan, di mana individu perlu mengevaluasi informasi secara kritis untuk membuat keputusan yang tepat terkait penelitian ilmiah dan kesehatan mereka (Sykes et al., 2013;<sup>420</sup> Leaning, 2019).<sup>421</sup>

---

<sup>415</sup> Pashia, A. (2017). Examining Structural Oppression as a Component of Information Literacy: A Call for Librarians to Support #BlackLivesMatter through Our Teaching. *Journal of Information Literacy*, 11, 86-104.

<sup>416</sup> Tewell, E. C. (2018). The Practice and Promise of Critical Information Literacy: Academic Librarians' Involvement in Critical Library Instruction. *College and Research Libraries*, 79(January), 10-34.

<sup>417</sup> Koltay, T. (2011). The media and the literacies: Media literacy, information literacy, digital literacy. *Media, culture & society*, 33(2), 211-221.

<sup>418</sup> Hsu, W., Chiang, C., & Yang, S. (2014). The effect of individual factors on health behaviors among college students: the mediating effects of eHealth literacy. *Journal of medical Internet research*, 16(12), e287.

<sup>419</sup> Mackey, T. P., & Jacobson, T. E. (2011). Reframing information literacy as a metaliteracy. *College & research libraries*, 72(1), 62-78.

<sup>420</sup> Sykes, S., Wills, J., Rowlands, G., & Popple, K. (2013). Understanding critical health literacy: a concept analysis. *BMC public health*, 13, 1-10.

<sup>421</sup> Leaning, M. (2019). An approach to digital literacy through the integration of media and information literacy. *Media and Communication*, 7(2), 4-13.

Penelitian menunjukkan bahwa CIL dapat membantu mengembangkan pemikiran kritis pada mahasiswa, terutama dalam menghadapi misinformasi yang tinggi di lingkungan online (Goodsett & Schmillen, 2022).<sup>422</sup> Selain itu, CIL juga menjadi keterampilan penting dalam memahami informasi kesehatan yang benar dan menghindari penyebaran informasi yang salah, terutama dalam konteks pandemi Covid-19 (Bezerra, 2021).<sup>423</sup>

Secara keseluruhan, CIL adalah pendekatan yang penting dalam memberdayakan individu untuk menjadi konsumen informasi yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu membuat keputusan yang tepat dalam berbagai aspek kehidupan

---

### 7.6.8 Open Educational Resources (OER)

Open Educational Resources (OER), atau Sumber Belajar Terbuka, adalah sumber belajar yang dapat diakses, digunakan, diedit, dan dibagikan secara bebas oleh siapa saja melalui internet. Aisyah et al. (2018) menjelaskan bahwa OER mencakup berbagai bahan ajar seperti modul, video, buku teks, dan sumber daya pendidikan lainnya. Potensi OER dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan, memperluas jangkauan pembelajaran, dan mendukung inklusi pendidikan di Indonesia sangatlah besar.<sup>424</sup>

Di Indonesia, penggunaan OER dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan dalam mengakses sumber belajar konvensional. Aisyah et al. (2018) menyoroti bahwa OER memungkinkan peserta didik dan pendidik mengakses bahan ajar tanpa terkendala biaya atau keterbatasan fisik, sehingga memperluas cakupan pendidikan di berbagai jenjang. Lebih lanjut, OER dapat mendukung inovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Dengan akses ke beragam sumber belajar terbuka, pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang lebih menarik dan beragam, serta berkolaborasi dengan pendidik lain untuk berbagi praktik terbaik dan bahan ajar yang efektif (Aisyah et al. , 2018).

Manfaat OER tidak hanya terbatas pada peningkatan akses dan inovasi pembelajaran. Yudhistira et al. (2022) menegaskan bahwa penggunaan OER juga dapat meningkatkan literasi digital dan literasi informasi di kalangan peserta didik. Dengan mengakses OER, peserta didik terbiasa menggunakan teknologi dan internet sebagai sumber belajar, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk menggali

---

<sup>422</sup> Goodsett, M., & Schmillen, H. (2022). Fostering critical thinking in first-year students through information literacy instruction. *College & Research Libraries*, 83(1), 91.

<sup>423</sup> Bezerra, A. C. (2021). From critical information literacy to a critical theory of information. *The international review of information ethics*, 30(1).

<sup>424</sup> Aisyah, S., & Novita, D. (2018, November). Digital World: Case Study from Universitas Terbuka's MOOCs Parenting Course. In *4th International Conference on Early Childhood Education. Semarang Early Childhood Research and Education Talks (SECRET 2018)* (hlm.124-131). Atlantis Press.

informasi secara mandiri.<sup>425</sup> Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin memengaruhi cara mengakses pembelajaran dan informasi di era digital.

Pemanfaatan OER juga berdampak positif pada perluasan akses pendidikan di daerah terpencil atau daerah dengan akses terbatas ke sumber daya pendidikan konvensional. Aisyah et al. (2018) menekankan bahwa OER dapat menjembatani kesenjangan akses pendidikan dengan memungkinkan peserta didik di berbagai wilayah di Indonesia mengakses bahan ajar berkualitas tanpa terkendala faktor geografis atau infrastruktur.

Dalam konteks pendidikan tinggi, Aisyah et al. (2018) mengemukakan bahwa penggunaan OER dapat mendukung pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan pasar kerja. Universitas dapat mengintegrasikan bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi terbaru melalui akses ke OER. Ini akan membantu menyiapkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

Namun, penggunaan OER juga menghadapi tantangan, terutama di negara-negara maju. Bell (2018) mengungkapkan kekhawatiran pustakawan akademik mengenai meningkatnya biaya buku teks dan materi kursus lainnya yang menjadi beban bagi mahasiswa)<sup>426</sup>. Seaman and Seaman (2017) melaporkan bahwa biaya rata-rata buku teks di Amerika Serikat mencapai \$97 per kelas, dan Redden (2011) menemukan bahwa 70% siswa pernah gagal membeli buku teks karena harganya terlalu tinggi<sup>427</sup>. Hal ini mendorong munculnya alternatif seperti menyewa atau berbagi buku teks, bahkan penerbit mulai menawarkan akses ke materi dengan tarif tetap (Lumpkin, 2020).<sup>428</sup>

OER muncul sebagai solusi potensial untuk mengatasi masalah biaya buku teks yang melonjak. Nagar dan Hallam-Miller (2019) mendefinisikan OER sebagai objek dan alat pembelajaran yang dapat diakses secara bebas melalui lisensi terbuka(hal. 1)<sup>429</sup>, sementara Hewlett Foundation (2019) menekankan bahwa OER mencakup materi pengajaran, pembelajaran, dan penelitian dalam berbagai media yang tersedia secara gratis untuk digunakan, diadaptasi, dan didistribusikan ulang.

---

<sup>425</sup> Yudhistira, S., Wahyuni, L. D., & Deasyanti, D. (2022). Literasi digital pada mahasiswa: dampak keberfungsian keluarga dalam mengatasi penyalahgunaan internet di masa pandemi. *Maarif*, 17(1). <https://doi.org/10.47651/mrf.v17i1.165>

<sup>426</sup> Bell, Stephen J., and Joseph A. Salem Jr. 2017. "It's Up to the Librarians." "Pennsylvania Libraries: Research and Practice." doi:10.5195/pairap.2017.166.

<sup>427</sup> Pashia, A. (2017). Examining Structural Oppression as a Component of Information Literacy: A Call for Librarians to Support #BlackLivesMatter through Our Teaching. *Journal of Information Literacy*, 11, 86-104.

<sup>428</sup> Lumpkin, Lauren. 2020. "Textbooks Are Pricey. So Students Are Getting Creative." *Washington Post*, January 17, 2020.

<sup>429</sup> Nagar dan Hallam-Miller 2019, 1

<sup>430</sup>. Wiley (2014) merumuskan kerangka kerja OER yang disebut "5Rs of Openness," yaitu Retain, Reuse, Revise, Remix, dan Redistribute, yang memberikan fleksibilitas bagi pendidik dalam menggunakan sumber daya ini. (hal. 3)<sup>431</sup>

Meskipun OER lebih dari sekadar buku teks dan mencakup berbagai bentuk sumber belajar (Nagar dan Hallam-Miller, 2019)<sup>432</sup>, SPARC (2018) melaporkan bahwa program percontohan buku teks terbuka di beberapa universitas telah berhasil menghemat biaya mahasiswa hingga \$128 per kursus. Namun, adopsi OER masih relatif rendah. Blankstein dan Wolff-Eisenberg (2019) menemukan bahwa meskipun mayoritas fakultas di Amerika Serikat menyadari pentingnya pengurangan biaya buku teks dan tertarik menggunakan OER, hanya 39% yang benar-benar menyadarinya. Hambatan adopsi termasuk kurangnya materi yang sesuai, persepsi kualitas rendah, kurangnya keakraban, dan upaya tambahan yang diperlukan.<sup>433</sup>

Meskipun demikian, penelitian seperti yang dilakukan oleh Colvard, Watson, dan Park (2018) menunjukkan bahwa adopsi OER tidak hanya menghemat biaya mahasiswa tetapi juga meningkatkan nilai akhir kursus dan menurunkan tingkat kegagalan. OER dapat mengatasi masalah keterjangkauan, penyelesaian, kesenjangan pencapaian, dan pembelajaran. (262)<sup>434</sup>

Hilton (2016) menemukan hasil serupa dalam ulasan enam belas studi. Dia menemukan bahwa "mahasiswa umumnya mencapai hasil belajar yang sama ketika OER digunakan dan secara bersamaan menghemat sejumlah besar uang" (573)<sup>435</sup>. Secara keseluruhan, kesadaran fakultas tumbuh dan tingkat adopsi buku teks OER telah meningkat, terutama dalam pendaftaran besar, kursus pengantar (Seaman dan Seaman 2017)<sup>436</sup>. Ketika fakultas memilih OER, seringkali karena pengaruh rekan atau keberadaan repositori OER (Bell 2018)<sup>437</sup>.

---

<sup>430</sup>Hewlett Foundation. 2019. "OER Defined." <https://hewlett.org/strategy/open-educational-resources>.

<sup>431</sup>Wiley, D. (2014, March 5). The Access Compromise and the 5th R. Iterating Toward Openness [Blog post].

<sup>432</sup>Nagar, R., & Hallam-Miller, J. (2019). Open Educational Resources. Tips and Trends, (Spring).

<sup>433</sup>"Blankstein, Melissa, and Christine Wolff-Eisenberg. (2019). Ithaka S+R US Faculty Survey 2018. New York: Ithaka S+R."

<sup>434</sup>Colvard, N. B., Watson, C. E., & Park, J. (2018). The Impact of Open Educational Resources on Various Student Success Metrics. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 30, 262-276.

<sup>435</sup>Hilton, J., III. (2016). Open Educational Resources and College Textbook Choices: A Review of Research on Efficacy and Perceptions. *Educational Technology Research and Development*, 64, 573-590.

<sup>436</sup>Seaman, J. E., & Seaman, J. (2017). *Opening the Textbook: Educational Resources in U.S. Higher Education, 2017*. Oakland, CA: Babson Survey Research Group.

<sup>437</sup>Bell, S. (2018). *Course Materials Adoption: A Faculty Survey and Outlook for the OER Landscape: A Choice White Paper*. Chicago: American Library Association.

Pustakawan akademik telah lama menyadari tantangan kenaikan biaya buku teks dan secara aktif mengadvokasi penggunaan materi berlisensi terbuka. Mereka menjadi pionir dalam gerakan Open Educational Resources (OER) di institusi mereka, mengembangkan program lokal untuk meningkatkan kesadaran dosen tentang manfaat dan ketersediaan OER, mendorong adopsi OER, serta mengelola repositori institusional (Bell dan Salem 2017)<sup>438</sup>. Pustakawan juga berperan penting dalam memberi informasi kepada dosen tentang penerbitan teks OER baru di bidang mereka dan bermitra dengan unit lain untuk memberikan penghargaan kepada dosen yang menggunakan OER (Dankowski 2016)<sup>439</sup>.

Upaya kolaboratif juga dilakukan melalui konsorsium perpustakaan yang telah menerima hibah untuk mempromosikan proyek OER. Pendekatan ini mencakup pemberian insentif finansial dan nonfinansial kepada dosen untuk mengadopsi OER. Beberapa inisiatif tingkat negara bagian, seperti Perpustakaan Virtual Virginia, Jaringan Perpustakaan Louisiana, dan OhioLINK, menyediakan pelatihan, subsidi, dan forum bagi dosen untuk belajar dan berdiskusi tentang OER (Bell dan Salem 2017).<sup>440</sup>

Pemerintah di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, juga menunjukkan minat yang meningkat pada buku teks terbuka sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi. Sebagai contoh, pada tahun 2018, Kongres Amerika Serikat mengalokasikan dana untuk Proyek Percontohan Buku Teks Terbuka (SPARC 2018)<sup>441</sup>. Open Textbook Network (OTN) telah berkembang menjadi komunitas praktik yang besar dengan lebih dari 600 anggota, termasuk universitas besar. OTN menyediakan pelatihan, alat pengumpulan data, dan peluang pengembangan kepemimpinan, serta mengelola Perpustakaan Teks Terbuka yang berisi berbagai teks akademik berlisensi terbuka di berbagai bidang studi (OTN, 2019a<sup>442</sup>; OTN, 2019c)<sup>443</sup>

OER memberikan manfaat yang signifikan bagi mahasiswa dengan memastikan aksesibilitas materi kuliah dan memberikan fleksibilitas bagi dosen untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan kelas mereka (Doan, 2017)<sup>444</sup>. Pustakawan akademik memiliki peran sentral dalam mempromosikan OER dan

---

<sup>438</sup> Bell, S. J., & Salem Jr, J. A. (2017). It's Up to the Librarians. *Pennsylvania Libraries: Research and Practice*. doi:10.5195/pairap.2017.166.

<sup>439</sup> Dankowski, T. (2016). Pushing for Open Textbooks; Libraries and Networks Try New Incentives and Funding. *American Libraries*, 47, 18-19.

<sup>440</sup> Bell, S. J., and Salem Jr, J. A. (2017). "It's Up to the Librarians." *Pennsylvania Libraries: Research and Practice*. doi:10.5195/pairap.2017.166.

<sup>441</sup> SPARC. 2018. "\$5 Million for Open Textbooks in FY18 Omnibus." <https://sparcopen.org/our-work/open-textbooks-fy18>.

<sup>442</sup> OTN (Open Textbook Network). (2019a). "Open Textbook Network." Retrieved from [research.cehd.umn.edu/otn](http://research.cehd.umn.edu/otn).

<sup>443</sup> OTN (Open Textbook Network). (2019c). "Open Textbook Library." Retrieved from [open.umn.edu/opentextbooks](http://open.umn.edu/opentextbooks).

<sup>444</sup> Doan, T. (2017). Why Not OER? *portal: Libraries and the Academy*, 17, 665-669.

keterjangkauan buku teks melalui berbagai cara, termasuk mengelola repositori OER, berkolaborasi dengan unit akademik dan dosen, serta memberikan pelatihan dan informasi terkini tentang ketersediaan teks OER (Davis et al. , 2016)<sup>445</sup>. Dengan kepemimpinan mereka, perpustakaan akademik dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan kesempatan pendidikan yang setara bagi ribuan mahasiswa.

---

### 7.6.9 Kepustakawanan Melengket

Selama beberapa dekade, di Amerika Serikat Perpustakaan Perguruan Tinggi telah memiliki "pustakawan penghubung" dalam staf profesional mereka. Pustakawan ini ditugaskan untuk memberikan layanan khusus kepada kelompok klien tertentu, seperti departemen akademik, sekolah, atau pusat penelitian. Tugas mereka meliputi pengembangan koleksi, menginformasikan dosen tentang materi terbitan terbaru, membantu pemesanan materi, menjadi penghubung komunikasi antara unit dan perpustakaan, serta membantu dosen dalam kebutuhan pengajaran dan penelitian mereka (Pospelova, Tsursumia, dan Tsibulnikova, 2018).<sup>446</sup> Pustakawan penghubung meningkatkan komunikasi antara perpustakaan dan unit akademik lainnya dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang misi dan kapasitas dukungan perpustakaan. Akibatnya, orang-orang ini memberikan kontribusi yang berharga bagi misi akademik institusi.

Ketika layanan perpustakaan akademik berevolusi dari yang berpusat pada koleksi menjadi berpusat pada pelajar atau pengguna, perpustakaan mencari keterlibatan yang lebih besar dengan unit akademik lainnya. Hasil alami dari perubahan ini adalah pengenalan pustakawan "kombinasi". Kepustakawanan melengket adalah pengayaan dan rekonseptualisasi yang signifikan dari proses penghubung. Alih-alih hanya menjadi saluran komunikasi dan konsultasi untuk unit akademik, pustakawan tertanam menjadi bagian integral dari unit, berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari, dan menambah nilai dengan memberikan saran dan bantuan tentang bagaimana pengetahuan diatur, diklasifikasikan, dan diambil. Misalnya, pustakawan tertanam telah mengintegrasikan instruksi perpustakaan ke dalam kurikulum unit akademik; memberikan pendidikan dan dukungan untuk masalah kekayaan intelektual; dan menawarkan dukungan untuk pengelolaan data penelitian, penelitian elektronik, dan visualisasi data (Church-Duran 2017)<sup>447</sup>.

Mereka mungkin memberikan kuliah tamu, menyumbangkan konten kursus ke modul instruksional, memberi nasihat tentang masalah desain instruksional, memberikan bantuan penelitian mendalam kepada mahasiswa atau fakultas, dan

---

<sup>445</sup> Davis, E., Cochran, D., Fagerheim, B., & Thoms, B. (2016). Enhancing Teaching and Learning: Libraries and Open Educational Resources in the Classroom. *Public Services Quarterly*, 12, 22-35

<sup>446</sup> Pospelova, A., Tsursumia, R., & Tsibulnikova, M. (2018). Embedded Librarians as Providers of Knowledge Services. *Portal: Libraries and the Academy*, 18, 651–669.

<sup>447</sup> Church-Duran, J. (2017). Distinctive Roles: Engagement, Innovation, and the Liaison Model. *Portal: Libraries and the Academy*, 17, 257–271.

mengadakan jam kerja (Mlinar 2019)<sup>448</sup>. Pada hakekatnya pustakawan yang disematkan menjadi partner, anggota tim, dan bagian dari budaya unit yang dilayani (Mlinar 2019)<sup>449</sup>. Unit itu bahkan mungkin berbagi atau menutupi pengeluaran gaji. Selain bantuan langsung, dalam beberapa kasus pustakawan tertanam menyediakan layanan melalui sistem manajemen kursus.

Pustakawan mungkin menawarkan bimbingan belajar, panduan interaktif, tautan, tutorial, modul pembelajaran, dan obrolan atau konsultasi jarak jauh. Agar program tersebut berhasil, para profesional ilmu perpustakaan dan informasi yang berpartisipasi harus memiliki keterampilan komunikasi dan interpersonal yang sangat baik, etika layanan yang kuat, dan disposisi yang fleksibel dan kreatif serta menikmati kolaborasi (Drewes dan Hoffman 2010)<sup>450</sup>. Dengan menjadi bagian dari komunitas lokal atau online, pustakawan akademik lebih mungkin dianggap sebagai bagian integral dari lingkungan belajar, kolaborator fakultas, dan berperan dalam keberhasilan program akademik. Hamilton (2012) menekankan pentingnya pustakawan yang terlibat aktif dalam proyek-proyek yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Dengan berkolaborasi secara langsung, pustakawan dan mitra mereka dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Semua pihak yang terlibat mendapatkan manfaat dari interaksi yang terjadi dalam proyek, kursus, atau unit studi tersebut(h,6)<sup>451</sup>

Pelajaran penting yang dapat diambil dalam konteks Indonesia adalah pentingnya peran pustakawan yang lebih aktif dan terlibat dalam komunitas akademik. Konsep "pustakawan tertanam" atau "embedded librarian" menunjukkan bahwa pustakawan tidak hanya bertugas mengelola koleksi, tetapi juga berperan sebagai mitra, kolaborator, dan bagian integral dari unit akademik yang dilayani.

Dalam konteks Indonesia, di mana akses terhadap informasi dan sumber daya pendidikan masih terbatas di beberapa daerah, peran pustakawan tertanam dapat sangat bermanfaat. Pustakawan dapat menjadi jembatan antara sumber informasi dengan mahasiswa dan dosen, membantu mereka dalam penelitian, pengajaran, dan pengembangan kurikulum. Dengan terlibat langsung dalam kegiatan akademik, pustakawan dapat memahami kebutuhan pengguna secara lebih mendalam dan memberikan layanan yang lebih relevan dan efektif.

Selain itu, konsep ini juga dapat mendorong kolaborasi yang lebih erat antara perpustakaan dengan unit akademik lainnya. Dengan menjadi bagian dari tim, pustakawan dapat berkontribusi dalam pengembangan kurikulum, memberikan

---

<sup>448</sup> Mlinar, C. (2019). *Embedded and Empowered: A Practical Guide for Librarians*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

<sup>449</sup> Mlinar, C. (2019). *Embedded and Empowered: A Practical Guide for Librarians*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

<sup>450</sup> Drewes, K., & Hoffman, N. (2010). Academic Embedded Librarianship: An Introduction. *Public Services Quarterly*, 6, 75–82.

<sup>451</sup> Hamilton, B.J. (2012). Introduction. In *Embedded Librarianship: Tools and Practices*. Chicago: American Library Association.

pelatihan literasi informasi, dan mendukung kegiatan penelitian. Kolaborasi ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di Indonesia.

Penerapan konsep pustakawan tertanam di Indonesia tentu memerlukan adaptasi dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Namun, dengan semangat kolaborasi dan inovasi, perpustakaan di Indonesia dapat mengambil inspirasi dari model ini untuk meningkatkan peran dan kontribusinya dalam dunia pendidikan dan penelitian.

---

#### 7.6.10 Pelestarian, Pelestarian Digital, Dan Kurasi Digital

Banyak disiplin ilmu masih mengandalkan materi fisik, baik cetak maupun audiovisual, yang perlu dilestarikan untuk kepentingan akademik jangka panjang. Misalnya di Amerika dan negara-negara eropah, Sejak tahun 1860-an, sebagian besar buku dan sumber daya lainnya dicetak di atas kertas asam yang mudah rapuh seiring waktu (Meyer, 2009)<sup>452</sup>. Perpustakaan penelitian menghadapi tantangan besar dalam menjaga koleksi ini, terutama dengan keterbatasan anggaran untuk konservasi (Meyer, 2009). Selain itu, faktor-faktor seperti penanganan yang tidak tepat, lingkungan penyimpanan yang buruk, dan kurangnya perencanaan bencana dapat mempercepat kerusakan (Cloonan, 2001).<sup>453</sup>

Untuk mengatasi masalah ini, perpustakaan menerapkan berbagai strategi, termasuk pelatihan staf, pendidikan pengguna, penyimpanan yang tepat, kontrol lingkungan, dan digitalisasi (Cloonan, 2001). Meskipun banyak perpustakaan akademik besar telah melakukan upaya ini, perencanaan pemulihan bencana sering kali terabaikan, dengan konsekuensi yang merugikan.

Digitalisasi telah menjadi fokus utama bagi universitas besar di Amerika Serikat untuk melestarikan materi cetak yang penting. Akses ke konten digital ini telah memberikan manfaat besar bagi akademisi di seluruh dunia (Blue Ribbon Task Force 2010, 1)<sup>454</sup>. Namun, Abby Smith (1999)<sup>455</sup> dan Cloonan (2001) menyoroti bahwa digitalisasi seringkali lebih merupakan inisiatif akses daripada pelestarian, dan bahkan dapat meningkatkan risiko kerusakan pada materi asli karena peningkatan permintaan.

Silverman (2016) memperingatkan bahwa fokus pada digitalisasi dapat menyebabkan pengabaian pelestarian fisik dan bahkan hilangnya artefak asli yang berharga. Dia menekankan pentingnya menyimpan artefak asli untuk otentikasi

---

<sup>452</sup> Meyer, L. (2009). *Safeguarding Collections at the Dawn of the 21st Century: Describing Roles and Measuring Contemporary Preservation Activities in ARL Libraries*. Washington, DC: Association of Research Libraries.

<sup>453</sup> Cloonan, M.V. (2001). *W(h)ither Preservation?* *Library Quarterly*, 71, 231-242.

<sup>454</sup> Blue Ribbon Task Force on Sustainable Digital Preservation and Access. (2010). *Sustainable Economics for a Digital Planet: Ensuring Long-Term Access to Digital Information*.

<sup>455</sup> Smith, Abby. (1999). *The Future of the Past: Preservation in American Research Libraries*. Washington, DC: Council on Library and Information Resources.

versi digital dan kemungkinan digitalisasi ulang di masa depan<sup>456</sup>. Silverman mengutip contoh digitalisasi massal surat kabar pada 1980-an yang mengakibatkan hilangnya edisi asli.

Digitalisasi telah secara substansial mengubah fokus dan teknik pelestarian dengan cara lain. Dalam sebuah laporan kepada Asosiasi Perpustakaan Penelitian tentang tantangan pelestarian, Meyer (2009) mencatat empat aspek penting dari situasi saat ini:

1. Perpustakaan penelitian telah sangat dipengaruhi oleh teknologi digital yang telah memengaruhi harapan dan perilaku pengguna.
2. Perpustakaan harus terus menyeimbangkan kebutuhan pelestarian koleksi fisik dan konten digital.
3. Dana tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pelestarian dalam koleksi penelitian.
4. Kolaborasi dan penciptaan sumber daya komunitas bersama dan strategi pelestarian sangat penting, terutama untuk konten digital.<sup>457</sup>

. Kebutuhan untuk menjaga berbagai sumber daya digital yang semakin bertambah telah memunculkan bidang baru yang sedang berkembang, yaitu pelestarian digital. Digital Preservation Coalition (DPC, 2015)<sup>458</sup> mendefinisikan pelestarian digital sebagai serangkaian kegiatan terkelola yang diperlukan untuk memastikan akses berkelanjutan terhadap materi digital selama dibutuhkan. DPC menguraikan tiga kerangka waktu potensial untuk pelestarian digital.

1. Pelestarian jangka pendek: Akses ke materi digital baik untuk jangka waktu tertentu saat penggunaan diprediksi tetapi tidak melampaui masa depan yang dapat diperkirakan dan/atau sampai menjadi tidak dapat diakses karena perubahan teknologi.
2. Pelestarian jangka menengah: Akses berkelanjutan ke materi digital di luar perubahan teknologi untuk jangka waktu tertentu tetapi tidak tanpa batas.
3. Pelestarian jangka panjang: Akses berkelanjutan ke materi digital, atau setidaknya informasi yang terkandung di dalamnya, tanpa batas waktu. (DPC 2015, )<sup>459</sup>

---

<sup>456</sup>Cloonan, M. V. (2001). W(h)ither Preservation? *Library Quarterly*, 71, 231–242.

<sup>457</sup>Meyer, Lars. (2009). *Safeguarding Collections at the Dawn of the 21st Century: Describing Roles and Measuring Contemporary Preservation Activities in ARL Libraries*. Washington, DC: Association of Research Libraries.

<sup>458</sup>DPC (Digital Preservation Coalition). (2015). *Digital Preservation Handbook* (2nd ed.). Retrieved from [www.handbook.dpconline.org](http://www.handbook.dpconline.org).

<sup>459</sup>*Ibid*

Pelestarian digital, terkadang disebut juga sebagai "kurasi digital", merupakan bidang yang sedang berkembang dan berfokus pada upaya menjaga akses berkelanjutan terhadap materi digital. Meyer (2009) melihat pelestarian digital sebagai bagian dari kurasi digital yang lebih luas, mencakup seluruh siklus hidup objek digital, mulai dari pembuatan hingga penggunaan kembali.

Meyer (2009) mendefinisikan sebagai "semua aktivitas yang berhubungan dengan pembuatan, penangkapan, deskripsi, penggunaan, pelestarian, dan penggunaan kembali sumber daya digital, baik itu objek digital sederhana (misalnya, file suara) atau satu set sumber daya digital yang saling terkait, misalnya, situs web (29)<sup>460</sup>

Perkembangan teknologi informasi telah memperluas cakupan informasi digital, tidak hanya terbatas pada materi fisik yang didigitalkan, tetapi juga mencakup sumber daya "lahir digital" seperti blog, situs web, kumpulan data, game, dan karya seni (Meyer, 2009). Keragaman media digital ini menghadirkan tantangan baru dalam pelestarian, seperti risiko kerusakan yang lebih tinggi dan kebutuhan untuk mereplikasi pengalaman pengguna asli (Houghton 2016, 1)<sup>461</sup>

Di masa lalu, perpustakaan akademik memiliki kendali besar atas konten ilmiah. Namun, saat ini sebagian besar informasi digital dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga seperti penerbit dan vendor penyimpanan jurnal (DPC, 2015)<sup>462</sup>. Hal ini mendorong perpustakaan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya pelestarian digital. Kolaborasi ini dapat bermanfaat untuk menghindari duplikasi usaha, tetapi juga menimbulkan tantangan ketika konten digital kehilangan nilai komersialnya (Blue Ribbon Task Force, 2010)<sup>463</sup>

Perpustakaan akademik menghadapi dilema dalam menyeimbangkan kebutuhan akan sumber daya digital saat ini dengan kebutuhan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya yang sudah ada, sementara anggaran perpustakaan belum meningkat seiring dengan tanggung jawab pelestarian yang bertambah. Beberapa proyek digitalisasi skala besar, seperti HathiTrust, telah diinisiasi untuk mengatasi tantangan ini.

Mengingat tidak mungkin melestarikan semua konten digital, perpustakaan perlu menetapkan kriteria untuk menentukan sumber daya digital mana yang harus dipertahankan. Selain itu, staf pelestarian digital harus memiliki beragam

---

<sup>460</sup> "Meyer, Lars. (2009). *Safeguarding Collections at the Dawn of the 21st Century: Describing Roles and Measuring Contemporary Preservation Activities in ARL Libraries*. Washington, DC: Association of Research Libraries.

<sup>461</sup> "Houghton, Bernadette. (2016). *Preservation Challenges in the Digital Age*. *D-Lib Magazine*, 22, 1-9.

<sup>462</sup> "Meyer, Lars. (2009). *Safeguarding Collections at the Dawn of the 21st Century: Describing Roles and Measuring Contemporary Preservation Activities in ARL Libraries*. Washington, DC: Association of Research Libraries."

<sup>463</sup> "Blue Ribbon Task Force on Sustainable Digital Preservation and Access. (2010). *Sustainable Economics for a Digital Planet: Ensuring Long-Term Access to Digital Information*."

keterampilan dan pengalaman, termasuk kemampuan untuk (1) merencanakan, menilai, dan memprioritaskan; (2) mengembangkan kebijakan, standar, dan praktik terbaik; (3) berkolaborasi dengan departemen perpustakaan lain; (4) mengembangkan rencana dan tanggapan darurat; (5) mengelola kemitraan eksternal; (6) membuat metadata untuk objek digital; (7) mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program; dan (8) mengelola anggaran (Miller dan Horan, 2017)<sup>464</sup>.

Pelestarian digital menghadapi sejumlah tantangan tambahan. Houghton (2016) mengidentifikasi beberapa di antaranya, termasuk banyaknya sumber data digital, kesulitan dalam menentukan apa yang harus dipertahankan dan apakah data tersebut dapat dipertahankan, adanya beberapa versi yang mungkin tersimpan di lokasi berbeda dengan nama file dan format file yang berbeda, masalah keusangan, kerusakan, dan ketidaksesuaian dengan perangkat keras, perangkat lunak, dan format file, metadata yang buruk, undang-undang kekayaan intelektual yang membatasi penyalinan dan penggunaan materi digital, serta biaya staf dan infrastruktur yang tinggi. .<sup>465</sup>

Baucom (2019) menyimpulkan bahwa pada akhirnya, pelestarian digital adalah tentang manajemen risiko. Program pelestarian digital harus dibangun berdasarkan tingkat risiko kehilangan materi digital yang dapat diterima oleh organisasi. (h,2)<sup>466</sup>

---

#### 7.6.11 Manajemen Data & Informasi Riset (RDM/RIM/RIMS)

Dalam era digital, data penelitian telah menjadi aset berharga yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi. Pentingnya menjaga dan mengelola data ini tidak hanya diakui oleh komunitas akademik, tetapi juga semakin didorong oleh pembuat kebijakan dan badan pendanaan. Retensi dan kurasi jangka panjang kumpulan data penelitian kini menjadi praktik umum di berbagai disiplin ilmu, baik untuk mendukung replikasi temuan maupun untuk memfasilitasi penggunaan ulang data dalam penelitian baru (Bryant, Lavoie, & Malpas, 2017).

Semakin banyak kebijakan dan inisiatif yang mendorong keterbukaan dan aksesibilitas data penelitian. Sebagai contoh, pada tahun 2013, Presiden Obama mengeluarkan Instruksi Presiden yang mewajibkan lembaga federal di Amerika Serikat untuk mengembangkan rencana meningkatkan akses publik terhadap hasil penelitian yang didanai oleh pemerintah (The Executive Office of the President, 2013). Hal ini menunjukkan adanya pengakuan yang semakin besar terhadap

---

<sup>464</sup> "Miller, Mary, and Martha Horan. (2017). Evolving Roles of Preservation Professionals: Trends in Position Announcements from 2004-2015. *Library Resources and Technical Services*, 61, 183-197."

<sup>465</sup> "Houghton, Bernadette. (2016). Preservation Challenges in the Digital Age. *D-Lib Magazine*, 22, 1-9."

<sup>466</sup> "Baucom, Erin. (2019). Preservation as Risk Management: Ensuring Availability of Digital Materials for Future Users. *American Libraries*, September 3."

pentingnya berbagi data penelitian untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi.

Peningkatan volume dan kompleksitas data penelitian telah mendorong munculnya bidang Manajemen Data Penelitian (RDM) yang bertujuan untuk memastikan bahwa data penelitian didokumentasikan, diatur, disimpan, dan dikuratori dengan baik (Tripathi, Shukla, & Sonker, 2017). Penerapan prinsip FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) menjadi salah satu fokus utama dalam RDM untuk meningkatkan kualitas dan kegunaan data penelitian.

Pentingnya melestarikan data digital bagi para peneliti dan akademisi tidak dapat disangkal. Bryant, Lavoie, dan Malpas (2017) menyoroti bahwa retensi dan kurasi jangka panjang kumpulan data telah menjadi praktik umum di berbagai disiplin ilmu, baik untuk mendukung replikasi temuan penelitian maupun untuk memfasilitasi penggunaan kembali data untuk pertanyaan penelitian baru. (h,5)<sup>467</sup>

Penelitian telah lama menjadi fondasi penyelidikan ilmiah di bidang sains dan ilmu sosial. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, jumlah dan kompleksitas data penelitian telah meningkat pesat, menghasilkan kumpulan data besar yang dikenal sebagai Big Data. Hal ini mendorong munculnya bidang baru yang disebut Manajemen Data Penelitian (RDM). Tripathi, Shukla, dan Sonker (2017) mendefinisikan RDM sebagai pengelolaan data penelitian yang mencakup semua kegiatan dan proses untuk memastikan data penelitian terdokumentasi, terorganisir, tersimpan, terarsipkan, dan terkurasi dengan baik, sehingga dapat diakses, digunakan, dan digunakan kembali setelah penelitian selesai dan dilaporkan. <sup>468</sup>

Pentingnya menjaga dan mengelola data penelitian bagi para peneliti dan sarjana sangatlah nyata. Bryant, Lavoie, dan Malpas (2017) mengamati bahwa retensi dan kurasi jangka panjang kumpulan data telah menjadi praktik ilmiah umum di banyak disiplin ilmu, baik untuk mendukung replikasi temuan yang dipublikasikan maupun untuk memfasilitasi penggunaan ulang data untuk pertanyaan penelitian baru. (h,5)<sup>469</sup>

Pemerintah di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, semakin mendorong lembaga penelitian untuk membagikan data mereka secara terbuka. Sebagai contoh, pada tahun 2013, Presiden Obama mengeluarkan Instruksi Presiden yang mewajibkan lembaga federal untuk mengembangkan rencana peningkatan akses publik terhadap hasil penelitian yang didanai oleh pemerintah (The Executive Office of the President, 2013).

---

<sup>467</sup> Bryant, R., Lavoie, B., & Malpas, C. (2017). A Tour of the Research Data Management (RDM) Service Space: The Realities of Research Data Management, Part 1. Dublin, OH: OCLC Research. doi:10.25333/C3PG8J.

<sup>468</sup>Tripathi, M., Shukla, A., & Sonker, S. K. (2017). Research data management practices in university libraries: A study. *Journal of Library and Information Technology*, 37, 417-424.

<sup>469</sup>Bryant, R., Lavoie, B., & Malpas, C. (2017). A Tour of the Research Data Management (RDM) Service Space: The Realities of Research Data Management, Part 1. Dublin, OH: OCLC Research. doi:10.25333/C3PG8J.

Menanggapi hal ini, lembaga-lembaga seperti National Science Foundation (NSF) di Amerika Serikat mewajibkan pengajuan hibah menyertakan rencana pengelolaan data. Seiring dengan berkembangnya prioritas kegiatan penelitian yang mencakup berbagi data, diskusi mengenai prinsip dasar untuk meningkatkan penemuan dan analisis data penelitian semakin marak (NSF 2019, )<sup>470</sup>

FORCE11, sebuah kelompok yang terdiri dari cendekiawan, pustakawan, arsiparis, penerbit, dan penyandang dana penelitian, didirikan pada tahun 2014 untuk meningkatkan praktik penelitian melalui inovasi dalam cara pengetahuan dibuat dan dibagikan (FORCE11, 2019b,1)<sup>471</sup>. Mereka mengembangkan prinsip FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) untuk meningkatkan kualitas data digital agar dapat diakses, diintegrasikan, dan dianalisis dengan lebih baik (FORCE11, 2019a, 1) <sup>472</sup>.

Konsep FAIR juga diterapkan pada perpustakaan, arsip, dan koleksi museum untuk meningkatkan akses terhadap koleksi warisan budaya (Koster dan Woutersen-Windhouver, 2018). Selain itu, muncul bidang terkait yang lebih luas, yaitu Research Information Management (RIM), yang didefinisikan sebagai "agregasi, kurasi, dan pemanfaatan informasi tentang penelitian" (Bryant, Clements dkk. , 2017) <sup>473</sup>. RIM mencakup berbagai aspek informasi penelitian, seperti data kegiatan, keluaran penelitian, peneliti dan afiliasinya, publikasi, kumpulan data, paten, hibah, proyek, layanan akademik, penghargaan, laporan media, dan pernyataan dampak.

Banyak aspek RIM sejalan dengan misi perpustakaan akademik, seperti penemuan, akuisisi, penyebaran, dan analisis kegiatan ilmiah (Bryant, Clements dkk. , 2017). RIM dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pembuatan laporan produktivitas fakultas, laporan hibah dan penghargaan, dan database keahlian fakultas. Kemudahan akses terhadap penelitian fakultas juga dapat mendorong akses terbuka dan membantu universitas mematuhi persyaratan ketersediaan penelitian secara terbuka.

Beberapa lembaga akademik dan penelitian telah mengembangkan Sistem Manajemen Informasi Penelitian (RIMS) dalam kemitraan dengan perpustakaan akademik. RIMS mencakup tiga dimensi: pendidikan, keahlian, dan kurasi (Bryant,

---

<sup>470</sup> NSF (National Science Foundation). (2019). Dissemination and Sharing of Research Results. Retrieved from <https://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/dmp.jsp>.

<sup>471</sup> FORCE11. 2019b. "Mission and Guiding Principles." This document presents the mission and guiding principles of FORCE11 as an organization. It can be accessed at: <https://www.force11.org/print/6348>.

<sup>472</sup> FORCE11. 2019a. "Fair Data Principles." This document outlines the FAIR Data Principles and provides guidance on how to implement them in practice. It can be accessed at: <https://www.force11.org/print/6048>.

<sup>473</sup> Bryant, R., Clements, A., Felters, C., Groenewegen, D., Huggard, S., Mercer, H., Missingham, R., Oxnam, M., Rauh, A., & Wright, J. (2017). Research Information Management: Defining RIM and the Library's Role. Dublin, OH: OCLC Research. doi:10.25333/C3NK88.

Clements dkk. , 2017). Pustakawan dan profesional informasi berperan dalam memberikan nasihat, pelatihan, dan dukungan terkait RDM, serta mengelola penyimpanan, kurasi, keamanan, dan pelestarian kumpulan data penelitian ( Perrier dan Barnes, 2018)<sup>474</sup>.

Meskipun antusiasme terhadap RDM dan RIM semakin meningkat, implementasi RIMS masih terbatas. Sebagian besar perpustakaan akademik saat ini hanya fokus pada kegiatan pendidikan dan panduan penelitian, dan banyak pustakawan merasa kurang memiliki keterampilan atau waktu untuk memberikan dukungan RDM yang efektif (Federer, 2018). Keterlibatan perpustakaan dalam keahlian dan kurasi masih jarang terjadi karena tumpang tindih yurisdiksi dengan unit lain dan kekurangan staf yang terampil (Cox et al. 2017).<sup>475</sup>.

Kebangkitan RDM dan RIM merupakan hasil dari perkembangan teknologi digital, peningkatan jumlah data penelitian, keinginan untuk meningkatkan pengaruh dan reputasi, serta dorongan politik untuk membuka akses ke penelitian. Perpustakaan akademik dan pustakawan memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam RDM dan RIM, tetapi hal ini membutuhkan upaya bersama untuk mengembangkan layanan dan melatih profesional informasi agar dapat memberikan dukungan yang berarti.

---

#### 7.6.12 Humaniora Digital (Digital Humaniora)

Meningkatnya jumlah data penelitian yang besar, bersama dengan kemunculan dan komersialisasi Big Data, telah meningkatkan fokus pada nilai berbagai jenis data yang didigitalkan, termasuk dalam bidang humaniora. Cassella (2017) mencatat bahwa perpaduan teknologi informasi dan disiplin ilmu humaniora telah mengubah secara signifikan cara para peneliti di bidang humaniora melakukan penelitian, pengajaran, dan pembelajaran"(1)<sup>476</sup>.

Baik produk maupun metode yang digunakan dalam bidang humaniora telah mengalami perubahan akibat kemunculan teknologi digital. Bidang baru yang disebut Humaniora Digital (DH) muncul sebagai hasil dari perpaduan antara teknologi informasi dan disiplin ilmu humaniora (Braunstein, Golomb, & Hartsell-Gundy, 2015, xiv)<sup>477</sup>. DH melibatkan penerapan alat dan teknologi digital pada objek

---

<sup>474</sup> Perrier, L., & Barnes, L. (2018). Developing research data management services and support for researchers: A mixed methods study. *Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research*, 13(1).

<sup>475</sup> Cox, A. M., Kennan, M. A., Lyon, L., & Pinfield, S. (2017). Developments in Research Data Management in Academic Libraries: Towards an Understanding of Research Data Service Maturity. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 68, 2182-200.

<sup>476</sup> Cassella, M. (2017). New Trends in Academic Library Partnerships: Academic Libraries and Digital Humanities. IATUL Annual Conference Proceedings, January 1.

<sup>477</sup> Braunstein, L. R., Golomb, L., & Hartsell-Gundy, A. (2015). *Digital Humanities in the Library: Challenges and Opportunities for Subject Specialists*. Chicago: ACRL/ALA.

dan metode tradisional dalam humaniora, seperti yang diilustrasikan oleh Varner dan Hswe (2016) dengan contoh sejarawan yang membangun peta digital interaktif dan sarjana sastra yang menggunakan komputer untuk menganalisis pola dalam jutaan buku. (36)<sup>478</sup>

DH bersifat interdisipliner dan kolaboratif, membutuhkan keahlian dari berbagai bidang, termasuk teknologi digital, konten dan sumber daya digital, serta kemitraan dengan perpustakaan akademik (Cassella 2017)<sup>479</sup>. Perpustakaan akademik menyediakan berbagai layanan untuk mendukung DH, seperti ruang fisik untuk penelitian, layanan digital seperti pembuatan metadata, dukungan untuk koleksi digital, bantuan dalam pengelolaan data penelitian, dan pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual (Cassella, 2017).

Pustakawan humaniora digital bekerja sama erat dengan dosen humaniora, membantu mereka menemukan sumber daya, mengajarkan mahasiswa cara mengakses dan mengelola data humaniora digital, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan kelembagaan, serta membuat dan mengkurasi aset digital institusional (Griffin dan Taylor, 2017). Beberapa perpustakaan memiliki laboratorium khusus untuk mendukung kegiatan DH, sementara yang lain menyediakan saran kolaboratif ke pusat humaniora terdesentralisasi di seluruh kampus (Griffin dan Taylor 2017)<sup>480</sup>.

Namun, dukungan untuk DH di perpustakaan akademik belum merata. Varner dan Hswe (2016) melaporkan bahwa hanya sebagian kecil perpustakaan yang menyediakan layanan khusus untuk DH, meskipun sebagian besar memiliki repositori institusional dan membantu dalam perencanaan pelestarian digital. Meskipun demikian, perpustakaan akademik secara umum fokus pada kekuatan mereka dalam melestarikan data digital, membantu pembuatan metadata, dan menyediakan penyimpanan melalui repositori digital, serta menjadi pendukung kuat bagi upaya terkoordinasi dalam humaniora digital<sup>481</sup>.

Karena perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan relatif baru dari bidang DH itu sendiri, masih ada diskusi aktif tentang jenis dukungan instruksional apa yang harus diberikan oleh pustakawan DH, baik untuk siswa maupun cendekiawan. Russell dan Hensley (2017) mencatat bahwa meskipun berguna untuk menawarkan pendekatan berbasis keterampilan tentang cara menggunakan perangkat lunak DH, ada peningkatan penekanan pada penyediaan instruksi yang merangsang refleksi kritis dan tentang bagaimana menilai sumber DH, bagaimana

---

<sup>478</sup> Varner, S., & Hswe, P. (2016). Digital Humanities in Libraries. *American Libraries*, 47(January/February), 36-41.

<sup>479</sup> Cassella, M. (2017). New Trends in Academic Library Partnerships: Academic Libraries and Digital Humanities. *IATUL Annual Conference Proceedings*, January 1.

<sup>480</sup> Griffin, M., & Taylor, T. I. (2017). Shifting Expectations: Revisiting Core Concepts of Academic Librarianship in Undergraduate Classes with a Digital Humanities Focus. *College and Undergraduate Libraries*, 24, 452-466.

<sup>481</sup> Varner, S., & Hswe, P. (2016). Digital Humanities in Libraries. *American Libraries*, 47(January/February), 36-41.

mengatur DH data, dan cara menyajikan data. Pedagogi DH, mereka berpendapat, hanyalah bagian lain, meskipun baru, inisiatif literasi informasi yang telah disediakan pustakawan selama bertahun-tahun. Tujuan yang sama untuk membantu peserta didik menemukan, merenungkan, berpikir kritis, dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh adalah sama di DH seperti di bidang instruksional lainnya. Humaniora digital adalah kesempatan yang menarik bagi para profesional ilmu perpustakaan dan informasi untuk membantu siswa menemukan dan menggunakan sumber daya humaniora digital, mendukung fakultas dalam penelitian dan pengajaran mereka, dan menciptakan untuk seluruh badan akademik gudang penelitian dan pengetahuan untuk memajukan humaniora secara keseluruhan.<sup>482</sup>

Humaniora Digital (DH) merupakan bidang kolaboratif di mana alat dan teknologi digital diterapkan pada objek dan metode tradisional humaniora. DH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara penelitian, pengajaran, dan pembelajaran dalam humaniora dilakukan. Seiring dengan perkembangan Big Data, akumulasi data penelitian dalam jumlah besar telah memperluas penggunaan dan pengumpulan data dalam humaniora.

Humaniora digital (DH) telah muncul sebagai bidang interdisipliner yang dinamis, menjembatani kesenjangan antara teknologi digital dan studi humaniora tradisional. Sifat kolaboratif DH yang melekat memerlukan keahlian beragam, menyatukan para ahli teknologi digital dengan mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang konten dan sumber daya digital. Dalam lingkungan perpustakaan akademik, pustakawan humaniora digital memainkan peran penting dalam memfasilitasi interaksi antara fakultas humaniora dan kekayaan sumber daya humaniora digital yang tersedia. Mereka tidak hanya membantu dalam akses, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya ini, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan institusional yang mengatur aksesibilitas data, sekaligus berkontribusi pada pengembangan aset dan kurasi digital institusional.

Namun demikian, lanskap dukungan DH di perpustakaan akademik masih beragam. Sementara beberapa perpustakaan telah membentuk pusat beasiswa digital khusus atau bahkan pusat humaniora digital yang komprehensif, yang lain mungkin hanya menawarkan layanan ad hoc atau tidak memiliki dukungan khusus untuk DH sama sekali. Terlepas dari variasi ini, perpustakaan akademik secara konsisten menunjukkan kekuatan mereka dalam melestarikan data digital, menyediakan layanan metadata yang penting, dan memelihara repositori institusional yang menjadi tuan rumah bagi banyak proyek humaniora digital.

Seiring dengan kemajuan pesat teknologi informasi dan meningkatnya kompleksitas bidang DH, muncul perdebatan mengenai jenis dukungan instruksional yang paling efektif yang dapat diberikan oleh pustakawan DH, baik untuk mahasiswa maupun akademisi. Selain membekali peserta didik dengan

---

<sup>482</sup> Russell, J. E., & Hensley, M. K. (2017). Beyond Buttonology: Digital Humanities, Digital Pedagogy, and the ACRL Framework. *College and Research Libraries News*, 78, 588-600.

keterampilan praktis dalam menggunakan perangkat lunak DH, ada kebutuhan yang semakin besar akan instruksi yang mendorong refleksi kritis, praktik terbaik dalam pengorganisasian data DH, dan metode yang efektif untuk menyajikan data tersebut. Pedagogi DH, sebagai inisiatif literasi informasi yang sedang berkembang, bertujuan untuk memberdayakan peserta didik dengan kemampuan tidak hanya untuk menemukan dan merenungkan tetapi juga untuk berpikir kritis dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam domain DH yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, humaniora digital menghadirkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya bagi para profesional ilmu perpustakaan dan informasi. Dengan mendukung mahasiswa dalam menjelajahi dan memanfaatkan sumber daya humaniora digital, membantu fakultas dalam penelitian dan pengajaran mereka, dan berkontribusi pada penciptaan repositori penelitian dan pengetahuan yang berkembang, pustakawan DH memainkan peran penting dalam memajukan bidang humaniora secara keseluruhan.

---

#### 7.6.13 Isu-Isu Di Era Kecerdasan Buatan

Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menjadi perhatian di perpustakaan akademik selama beberapa tahun terakhir. Namun, kehadiran ChatGPT dan perangkat AI generatif lainnya telah memicu gelombang minat baru. Bagaimana tidak? AI berpotensi mengubah lanskap perpustakaan akademik secara signifikan. Andrew M. Cox dan Suvodeep Mazumdar, misalnya, menyoroti potensi AI dalam meningkatkan akses ke pengetahuan secara fundamental. Bayangkan pencarian dan rekomendasi yang lebih presisi, deskripsi materi digital yang lebih detail, transkripsi otomatis, bahkan terjemahan otomatis.<sup>483</sup>

Namun, di balik potensi besar tersebut, AI juga menghadirkan tantangan etika dan hukum yang tak bisa diabaikan. Mulai dari masalah bias, privasi, data pelatihan yang tidak representatif, hingga misinformasi, serta isu hak cipta, plagiarisme, dan eksploitasi. Di sisi lain, kemudahan penggunaan alat AI generatif seperti ChatGPT telah memikat banyak pengguna. Alat-alat ini memanfaatkan model bahasa besar (Large Language Models/LLMs) yang terlatih pada kumpulan data teks dan gambar yang masif. LLM menggunakan jaringan saraf dan pemrosesan bahasa alami untuk menganalisis masukan dan menghasilkan respons berdasarkan pola yang dipelajari dari data.

Tidak hanya ChatGPT, dunia perpustakaan akademik juga menyaksikan integrasi AI dalam pencarian literatur, peringkasan, dan alat pemrograman seperti Elicit, Semantic Scholar, scite, dan Copilot for GitHub. Seiring meningkatnya penggunaan alat ini di kalangan mahasiswa, para dosen pun semakin bergantung pada pustakawan untuk membina literasi AI. Diskusi tentang AI dan dampaknya

---

<sup>483</sup> Cox, A. M., & Mazumdar, S. (2024). Defining artificial intelligence for librarians. *Journal of librarianship and information science*, 56(2), 330-340.

pada pencarian literatur dan sitasi menjadi semakin relevan dalam proses pembelajaran.<sup>484</sup>

Duri Long dan Brian Magerko mendefinisikan literasi AI sebagai seperangkat kompetensi yang memungkinkan individu mengevaluasi teknologi AI secara kritis, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan AI, serta memanfaatkan AI sebagai alat bantu di berbagai aspek kehidupan<sup>485</sup>. Leo S. Lo, seorang pakar di bidang ini, bahkan telah merancang kerangka kerja untuk membantu pustakawan dan mahasiswa dalam mengembangkan prompt yang lebih efektif untuk AI generatif, sebuah proses yang dikenal sebagai prompt engineering. Dengan kerangka kerja ini, pustakawan dapat membantu mahasiswa mengasah kemampuan berpikir kritis, meningkatkan pemahaman mereka terhadap konten yang dihasilkan AI, dan mengoptimalkan proses penelitian berbasis AI.<sup>486</sup>

Namun, penting untuk diingat bahwa literasi AI juga mencakup pemahaman akan potensi masalah yang terkait dengan AI, seperti akurasi, halusinasi, bias, isu etika, dan dampak lingkungan. Beberapa institusi telah mengambil langkah proaktif dengan mengadakan lokakarya untuk membahas dan memfasilitasi dialog dengan mahasiswa mengenai isu-isu ini. University of Florida bahkan telah meluncurkan inisiatif AI Across the Curriculum untuk memperkenalkan AI kepada seluruh mahasiswa sarjana dan membekali mereka dengan keterampilan yang relevan untuk dunia kerja di masa depan.

---

<sup>484</sup> Coffey, L. (2023). AI, the next chapter for college librarians. *W: Inside Higher Education [online]*. November, 3, 2023.

<sup>485</sup> Long, D., & Magerko, B. (2020, April). What is AI literacy? Competencies and design considerations. In *Proceedings of the 2020 CHI conference on human factors in computing systems* (pp. 1-16).

<sup>486</sup> Lo, L. S. (2023). The CLEAR path: A framework for enhancing information literacy through prompt engineering. *The Journal of Academic Librarianship*, 49(4), 102720.